



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA MAGELANG

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2, Kota Magelang

<http://diskominsta.magelangkota.go.id/>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH

NIP : 19690724 199803 1 006

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Magelang

Berdasar Keputusan Walikota Magelang Nomor 821.2/52/430 tanggal 27 Mei 2022. Bertugas untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang Berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 19 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Statistik
Kota Magelang



MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
Perbina Utama Muda
NIP. 19690724 199803 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 7

 1.3.1 Maksud..... 7

 1.3.2 Tujuan 7

 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

 PERANGKAT DAERAH

 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9

 2.2 Permasalahan dan Isu..... 39

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

 3.1 Tujuan dan Sasaran 51

 3.2 Strategi dan Kebijakan..... 59

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD... 65

 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 115

BAB V PENUTUP 119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Berdasarkan Jenis Kelamin, 2025	15
Tabel 2.2.	ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan, 2025.....	16
Tabel 2.3.	ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2025	16
Tabel 2.4.	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika dan Statistisk Kota Magelang, 2025.....	17
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2022 – 2024	19
Tabel 2.6	Tabel Capaian SPBE Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2022 -2024	22
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2022 - 2024.....	27
Tabel 2.8	Kerjasama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2021 – 2025.....	32
Tabel 2.9	Inovasi Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2021 – 2025.....	34
Tabel 2.10	Tabel Permasalahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.....	39
Tabel 2.11	Tabel Isu Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.....	49
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2024 -2030	52
Tabel 3.2	Strategi Berdasarkan Analisis SWOT Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang	60

Tabel 3.3	Tahapan Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2026-2030	61
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2025-2029	62
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2025-2029	66
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2025-2030	96
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2025-2029	111
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistikdian Kota Magelang Tahun 2025-2029	116
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika dan StatistikdianKota Magelang Tahun 2025-2029	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Kota Magelang dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya 2

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Magelang terlihat pada Gambar 10

Gambar Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
SPBE (2022-2024) 21

Gambar Penghargaan Penghargaan (2021-2025) 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

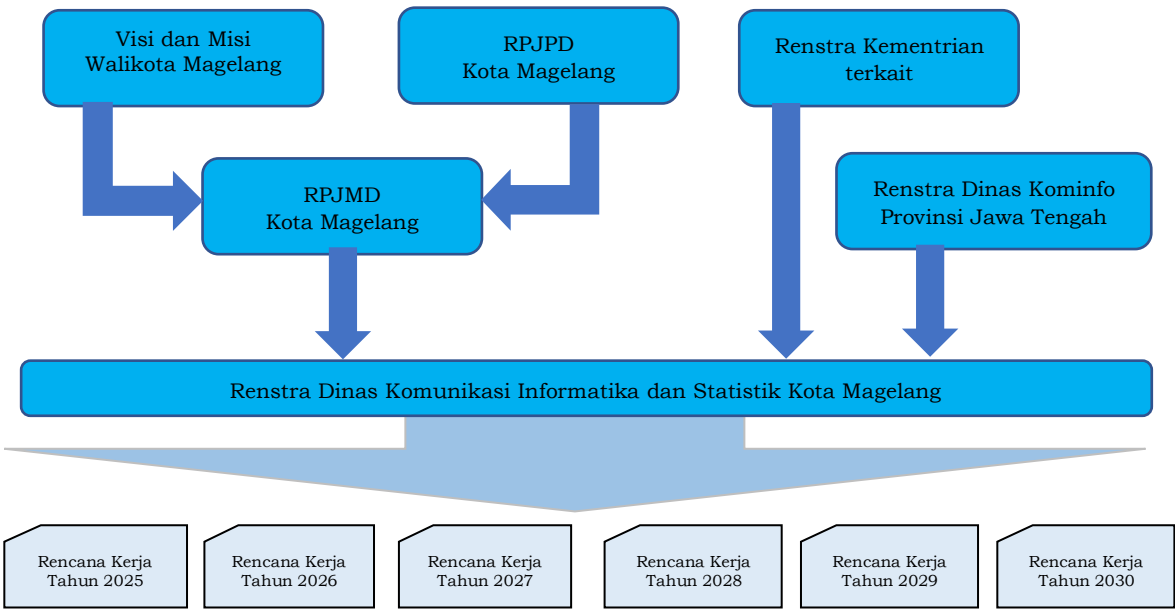
Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Magelang maka Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Magelang wajib

menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Magelang diharapkan dapat mengintegrasikan semua sumber daya yang dikelola, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Magelang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.



Gambar 1.1
Skema Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra merupakan suatu kewajiban perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan acuan kinerja perangkat daerah guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan

sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri No 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Magelang;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang selama kurun waktu tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang;
- b. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Magelang khususnya Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029;
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
- d. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang;
- B. Dasar Hukum Penyusunan;
- C. Maksud dan Tujuan;
- D. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- D. Kelompok Sasaran Layanan
- E. Permasalahan Perangkat Daerah;
- F. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2029;
- B. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2029
- C. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- D. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- A. Uraian Program;
- B. Uraian Kegiatan;
- C. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- D. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah;
- E. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- F. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang dibentuk sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang. Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 61 Tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas adalah:

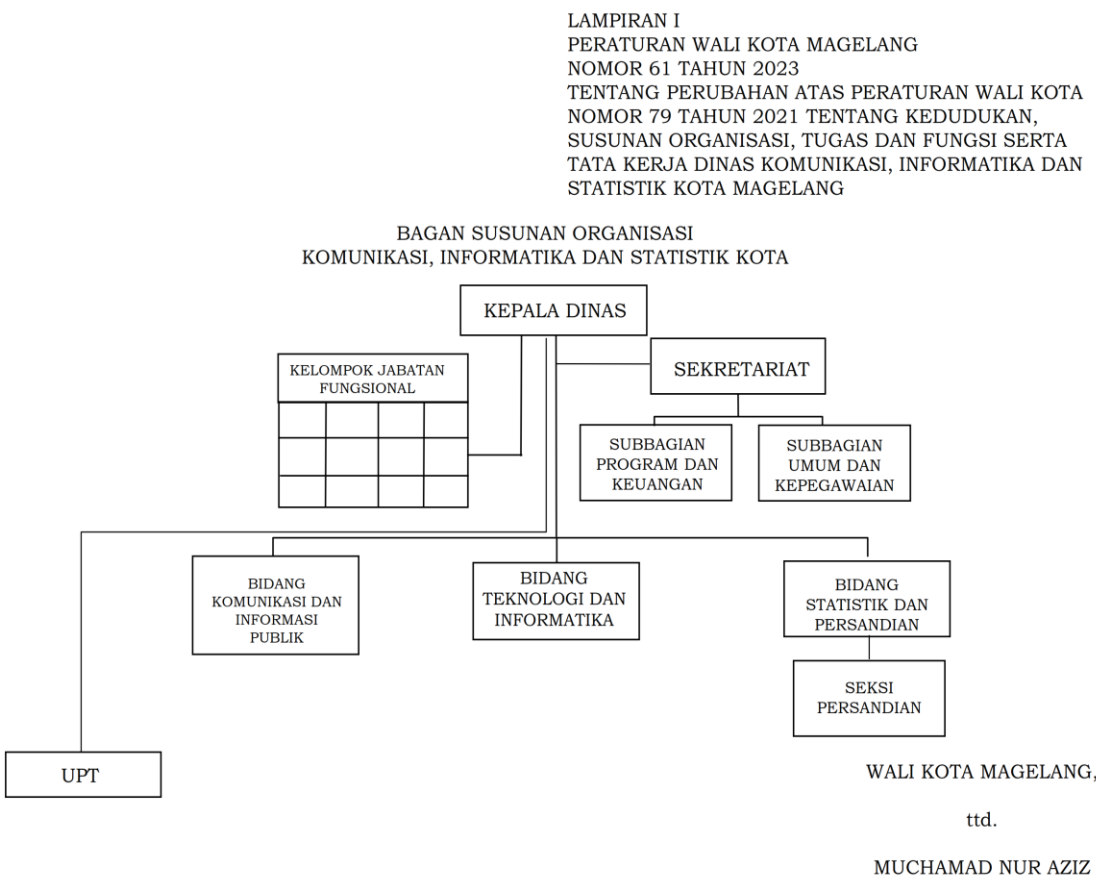
- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas;
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka susunan organisasi kelembagaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala dengan Eselon II b.
- b. Sekretaris dengan Eselon III a, dan membawahi dua Kepala Sub Bagian (Eselon IV a), yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dengan Eselon III b.
- d. Kepala Bidang Teknologi Informatika dengan Eselon III b.

- e. Kepala Bidang Statistik dan Persandian dengan Eselon III b, membawahi Kepala Seksi (Eselon IV a).

Secara struktur organisasi, bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang terlihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Uraian Tugas Jabatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Pelaksanaan ketiga urusan tersebut dibantu oleh seorang Sekretaris, tiga Kepala Bidang, satu Kepala Seksi dan dua Kepala Sub Bagian pada Sekretariat. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas :

1. merumuskan dan menetapkan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

2. merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Dinas;
4. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
5. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informasi yang meliputi komunikasi publik dan diseminasi informasi;
6. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang teknologi informatika yang meliputi pengembangan teknologi informasi, pemeliharaan jaringan dan pengelolaan data elektronik;
7. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan persandian yang meliputi pengembangan statistik sektoral dan pelaksanaan fungsi persandian;
8. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas UPT;
9. mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik Daerah dan urusan umum di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
11. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
12. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
13. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum

dan kepegawaian di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas:

1. menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
2. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
4. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
5. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
6. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Dinas;
7. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas;
8. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Dinas;
9. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas;
10. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
11. melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan
12. barang/ jasa di lingkup Dinas;
13. melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Dinas;
14. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
15. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
16. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Sekretariat; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP)

Tugas Pokok Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik adalah melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi:

1. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
2. mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis komunikasi dan informasi publik;
3. melaksanakan pembinaan teknis bagi pelaku komunikasi dan informasi publik;
4. membina dan mengembangkan diseminasi informasi melalui media cetak dan media elektronik;
5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media;
6. menyusun rekomendasi dalam pemberian pertimbangan atas rencana pengeluaran perizinan/non perizinan di bidangnya, serta mengoordinasikan dan mengendalikan target pendapatan yang bersumber dari retribusi;
7. mengoordinasikan pelaksanaan forum koordinasi kehumasan;
8. melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
10. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
11. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala Bidang Teknologi Informatika (TI)

Tugas Pokok Kepala Bidang Teknologi Informatika adalah melaksanakan urusan bidang teknologi informatika. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Teknologi Informatika mempunyai fungsi:

1. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Teknologi Informatika;

2. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang teknologi informatika;
3. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi serta jaringan komunikasi elektronik;
4. mengoordinasikan pengembangan teknologi informatika;
5. mengoordinasikan bimbingan dan pengendalian komputerisasi terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
6. mengoordinasikan pembinaan pemanfaatan Layanan Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. mengoordinasikan pengembangan Aplikasi terintegrasi;
8. mengoordinasikan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana jaringan komputer dan telekomunikasi;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Teknologi Informatika;
10. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
11. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Teknologi Informatika; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kepala Bidang Statistik dan Persandian (SP)

Tugas Pokok Kepala Bidang Statistik dan Persandian adalah melaksanakan urusan urusan bidang statistik dan persandian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

1. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian;
2. mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian;
3. mengoordinasikan penyajian statistik sektoral di lingkup Pemerintah Kota Magelang;
4. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi publik;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

- mengoordinasikan pengelolaan dan pengamanan informasi rahasia, berita sandi dan telekomunikasi;
- menyelia pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- mengoordinasikan dalam pengelolaan security operation center dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- melaksanakan pemulihan gangguan data atau sistem operational persandian dan keamanan informasi;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian;
- memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Statistik dan Persandian;
- dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) aparatur pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang per 30 Juni 2025 secara keseluruhan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibantu oleh 17 (tujuh belas) orang Non ASN.

Tabel 2.1.
ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
Berdasarkan Jenis Kelamin, 2025

N O	BIDANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	3	6	9
2	Komunikasi dan Informasi Publik (KIP)	4	3	7
3	Teknologi Informatika (TI)	8	2	10
4	Statistik dan Persandian (SP)	6	3	9
Total		21	14	35
Persentase		60,00%	40,00%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, Juni 2025

Tabel 2.2.
ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan, 2025

N O	GOLONGAN PNS	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	II	2	0	2
2	III	6	5	11
3	IV	4	3	7
Total		12	8	20
Persentase		60%	40%	100%
N O	KELAS PPPK	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	5	1	1	2
2	7	4	3	7
3	9	4	2	6
Total		9	6	15
Persentase		60%	40%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, Juni 2025

Tingkat pendidikan yang ditamatkan ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang didominasi S-1 sebesar 51,85%. Sementara itu jenjang tertinggi adalah S-2 yang mayoritas menempati jenjang di atas grade-9. Pemetaan jabatan berdasarkan kompetensi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang masih menunjukkan beberapa ketimpangan. Masih terdapat beberapa jabatan struktural yang belum sesuai dengan dengan keahlian dan kompetensi. Demikian juga dengan pejabat fungsional yang masih terbatas baik dari sisi jumlah maupun belum sesuai antara beban kerja dengan butir kegiatan yang seharusnya dijalankan.

Tabel 2.3.
ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, 2025

N O	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SLTP	0	0	0
2	SLTA	3	1	4
3	D-III	4	3	7
4	S1	9	6	15
5	S2	5	4	9
Total		21	14	35
Persentase		60%	40%	100%

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, Juni 2025

b. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja.

Tabel 2.4.
Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT BARANG	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Berat
1	TANAH	1	1	0
2	ALAT BESAR	4	4	0
3	ALAT ANGKUTAN	19	18	1
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	7	7	0
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	257	253	4
6	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	188	186	2
7	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	2	2	0
8	ALAT LABORATORIUM	1	1	0
9	ALAT KOMPUTER	423	398	25
10	BANGUNAN GEDUNG	1		
11	MONUMEN	10	10	0
12	TUGU TITIK KONTROL/ PASTI	1	1	0
13	JARINGAN	4	4	0
14	BAHAN PERPUSTAKAAN	1	1	0
15	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN /OLAH RAGA	1	1	0
16	SOFTWARE	9	9	0
JUMLAH		929	896	32

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, Juni 2025

C. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

a. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang

Untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada periode

sebelumnya (2022-2024) dapat dilihat melalui 2 hal, yaitu melalui hasil capaian kinerja dan melalui penyerapan anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang. Dimana hasil kinerja ini kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan 5 tahun mendatang (2025 - 2029) sehingga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih baik lagi dan mampu memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada periode sebelumnya. Untuk itu hasil kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2022 -2024

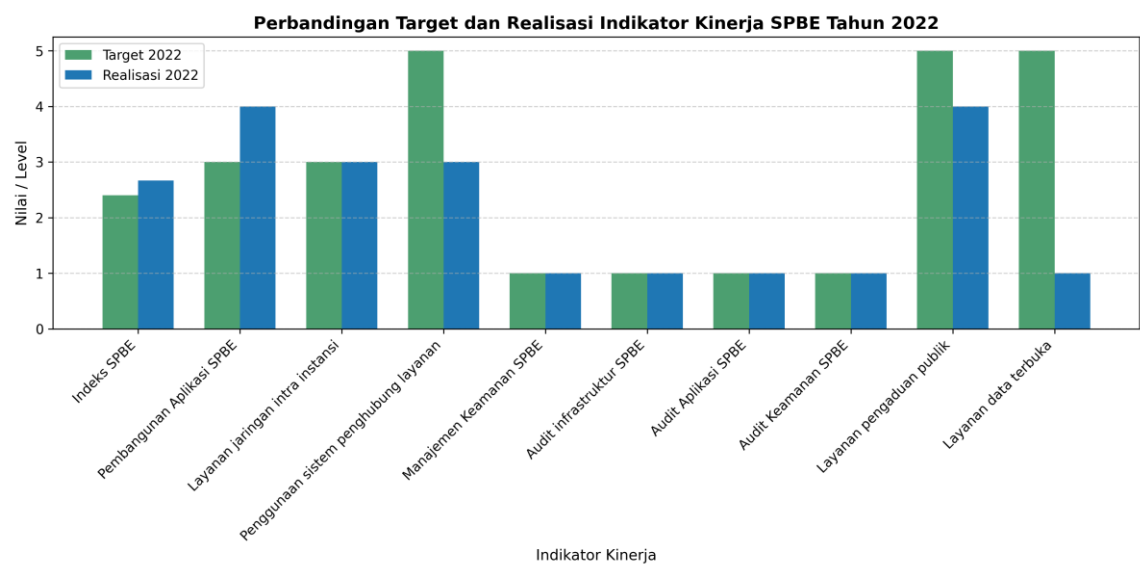
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun			Realisasi Capaian tahun			Rasio Capaian kepada tahun		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	12	13	14	17	18	19
	Indikator Tujuan												
1	Indeks SPBE	Nilai	-	-	2,4	2,55	2,67	2,67	3,36	3,69	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran												
1	a.Tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	-	-	3	3	4	4	3	3	100%	100%	75%
	b.Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/ pemerintah daerah	Level	-	-	3	3	4	3	4	4	100%	100%	100%
	c.Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/ pemerintah daerah	Level	-	-	5	5	5	3	3	3	60%	60%	60%
2	a.Penerapan manajemen Keamanan SPBE	Level	-	-	1	1	1	1	4	4	100%	100%	100%
	b.Tingkat kematangan Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE	Level	-	-	1	1	1	1	2	3	100%	100%	100%
	c.Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Aplikasi SPBE	Level	-	-	1	1	1	1	4	3	100%	100%	100%
	d.Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Keamanan SPBE	Level	-	-	1	1	1	1	4	2	100%	100%	100%
3	Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	Level	-	-	5	5	5	4	3	4	80%	60%	80%
4	Tingkat kematangan layanan data terbuka	Level	-	-	5	5	5	1	5	5	20%	100%	100%
	Indikator Program												
	1.Persentase pemanfaatan aplikasi informatika	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
	a.Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Nilai	-	-	24	34	47	91	109	109	100%	100%	100%
	b.Nilai Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	Nilai	-	-	18	32	30	26	61	61	100%	100%	100%
	c.Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi	Nilai	-	-	32	47	47	32	61	61	100%	100%	100%
	d.Nilai Pengelolaan Aset Informasi	Nilai	-	-	44	72	81	62	138	138	100%	100%	100%
	e.Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	Nilai	-	-	20	20	65	55	72	72	100%	100%	100%
	3.Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Level	-	-	Menuju infor	Informatif	Informatif	Menuju infor	Informatif	Informatif	100%	100%	100%

N o	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun			Realisasi Capaian tahun			Rasio Capaian kepada tahun		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	12	13	14	17	18	19
					matif			matif					
	4.a.Persentase perkembangan publikasi data sektoral dalam portal open data	%	-	-	14	24	33	18,8	21,7	33,3	100%	90,40 %	100%
	b.Indeks kepuasan pengguna data sektoral	Indeks	-	-	3,4	3,45	3,5	NA	NA	4,03	NA	NA	100%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)												
	2.o.1.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yangterhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DinasKominfo	%	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100%
	2.o.2.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secaraonline dan terintegrasi	%	-	-	-	-	-	49,2	95,24	76,83	49,2	95,24	76,8 3%
	2.o.3.Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaraninformasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100%
	2.s.1.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yangmenggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunandaerah	%	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100%
	2.s.2.Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalammelakukan evaluasi pembangunan daerah	%	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100%
	4.e.1.Informasi tentang sumber daya yang tersedia untukpelayanan (Information on resources available to frontlineservice delivery units)	%	-	-	-	-	-	100	65,47	100	100	65,47	100%
	4.e.2.Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Publicaccess to fiscal information)	%	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100%
	2.t.Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	-	-	-	-	-	41,24	68,37	68,37	41,2 4	68,37	68,3 7%

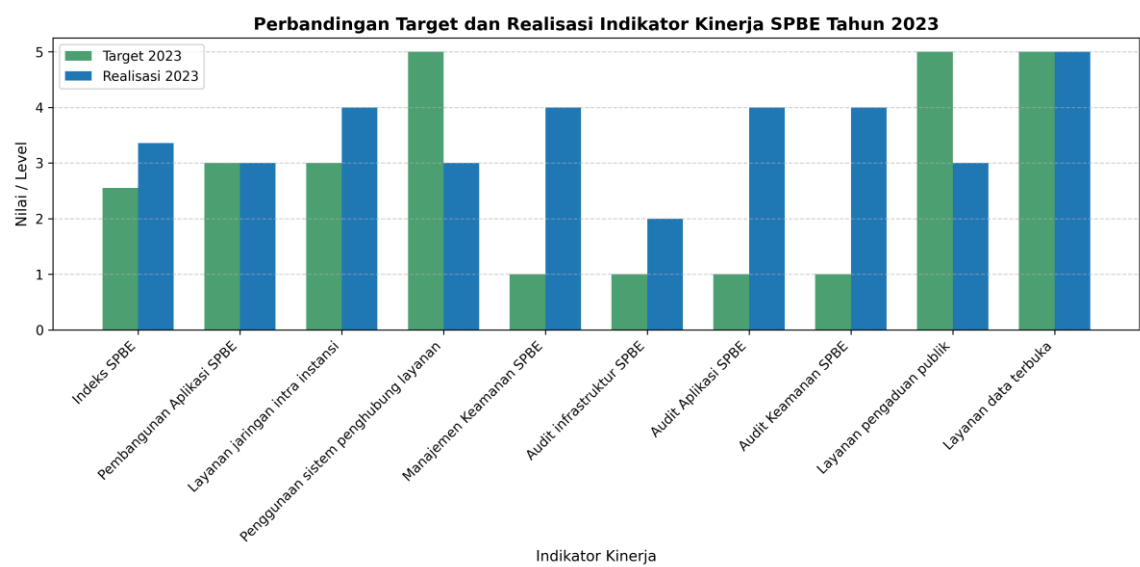
*Realisasi 2025 dihitung sampai dengan Triwulan II

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja SPBE (2022-2024)

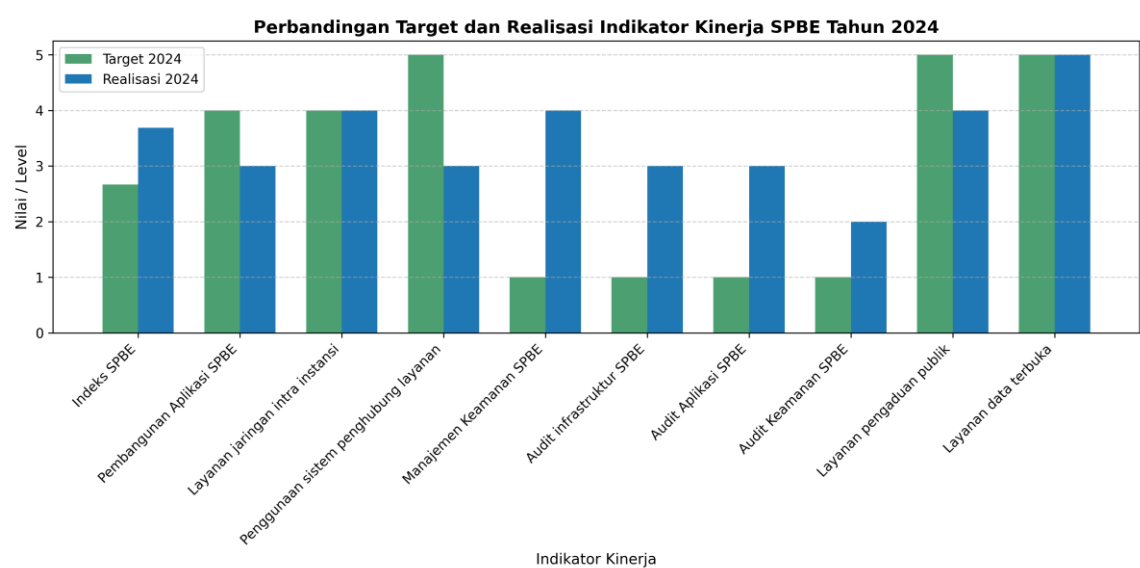
Tahun 2022



Tahun 2023



Tahun 2024



Dari tabel dan grafik diatas, dapat di analisis proses kinerja yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota

Magelang dari tahun 2022-2024.

Penguatan SPBE: Diskominsta berperan aktif dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk integrasi layanan digital antar perangkat daerah. Capaian SPBE dari tahun 2022-2024 selalu meningkat.

Tabel 2.6
Tabel Capaian SPBE
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2022 -2024

Tahun	Target	Capaian
2022	2,4	2,67
2023	2,55	3,36
2024	2,67	3,69

Sumber: Diskominsta (diolah)

Peningkatan capaian tiap tahun disebabkan karena naiknya indikator-indikator penyusun SPBE. Kenaikan indikator-indikator tersebut dikarenakan:

1. Pemerintah Kota Magelang sudah melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.
2. Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi/ keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah, serta telah melakukan reuiu dan evaluasi terhadap pengoperasiannya. Pembangunan Jaringan intra sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 dengan cakupan 28 OPD, 1 RSUD, 17 Kelurahan, 13 Sekolah, 21 Layanan Kesehatan, 6 Lain-lain dengan total 86 (delapan puluh enam) titik yang terkoneksi, termonitoring dan selalu di review serta di evaluasi.
3. Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
4. Diskominsta menindaklanjuti percepatan pengamanan informasi dan data dengan mengelola sistem persandian untuk menjamin keamanan komunikasi internal antar perangkat daerah. Pelayanan Persandian didasarkan pada Perwal No. 53 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemkot

Magelang. Perwal No. 15 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik. Perwal No. 39 Tahun 2023 tentang manajemen keamanan informasi SPBE. Tujuan dan manfaat pelayanan persandian yang dilakukan oleh Diskominsta Kota Magelang:

- 1) Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian informasi di lingkungan Pemkot.
 - 2) Memberikan layanan keamanan informasi yang terstandar dan terintegrasi.
 - 3) Mempermudah koordinasi dan konsultasi antar perangkat daerah terkait keamanan informasi.
5. Pemerintah Kota Magelang sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan kependudukan, perizinan, dan/atau dengan layanan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. Layanan pengaduan di Kota Magelang dilandasi oleh:
- 1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2) Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - 3) PermenPANRB No. 62 Tahun 2018 tentang SP4N-LAPOR!;
 - 4) Perwali Kota Magelang No. 32 Tahun 2020 tentang Layanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Tujuan utamanya adalah menyediakan kanal partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, atau dugaan pelanggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terukur. Pemerintah Kota Magelang menggunakan layanan pengaduan online lokal yaitu MONGGO LAPOR yang dapat diakses melalui berbagai platform dan Aplikasi Pengaduan Nasional yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan SP4N-LAPOR <https://www.lapor.go.id/> serta Portal Laporan Pengaduan Online Provinsi Jawa Tengah <https://laporgub.jatengprov.go.id/>. selanjutnya admin Perangkat Daerah cukup memiliki satu user dan menanggapi seluruh laporan yang masuk.

6. Pemerintah Kota Magelang sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik dikelola melalui Penyediaan Data Sektoral Kota Magelang. Melalui Platform Utama Portal DataGO dengan Alamat datago.magelangkota.go.id menjadi sistem penyediaan data sektoral yang terintegrasi, terbuka, dan berkualitas. Inisiatif ini menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, evaluasi kinerja, dan pengambilan kebijakan berbasis data. Portal DataGO Menyediakan data sektoral dari seluruh OPD, termasuk indikator makro, mikro, gender, kemiskinan, harga komoditas, dan data spasial. Dampak Strategis dengan dimilikinya Portal DataGo antara lain meningkatkan efisiensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah. Memperkuat transparansi data sebagai instrumen kontrol sosial. Mendorong sinergi antar sektor serta kolaborasi akademik, media, dan masyarakat dalam penggunaan data.

Analisis Capaian IKK Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang sebagai berikut:

1. Konektivitas dan Infrastruktur Digital
 - 1) Capaian 100% konektivitas internet antar-OPD yang konsisten selama empat tahun menunjukkan bahwa Kota Magelang telah memiliki infrastruktur jaringan yang relatif stabil dan merata.
 - 2) Hal ini menjadi pondasi penting dalam transformasi digital pemerintahan, karena tanpa dukungan infrastruktur dasar, layanan digital tidak dapat beroperasi optimal.
 - 3) Konsistensi capaian juga menunjukkan keberlanjutan pemeliharaan jaringan yang baik.
2. Transformasi Layanan Publik Digital
 - 1) Indikator layanan publik online dan terintegrasi memperlihatkan tren fluktuatif: meningkat tajam dari 49,20% (2021–2022) menjadi 95,24% (2023), namun menurun ke 76,83% (2024).
 - 2) Lonjakan 2023 menunjukkan adanya lompatan digitalisasi, mungkin karena percepatan integrasi aplikasi layanan.

Namun penurunan pada 2024 mengindikasikan kendala sustainabilitas: berupa Regulasi dari Kementerian yang menyebabkan banyak aplikasi menjadi tidak terintegrasi.

- 3) Ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya soal pencapaian target sesaat, tetapi juga kemampuan mempertahankan kualitas dan keandalan layanan secara berkelanjutan.
3. Efektivitas Diseminasi Informasi Publik
 - 1) Capaian 100% tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap informasi publik dan kebijakan menunjukkan keberhasilan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
 - 2) Hal ini penting dalam membangun partisipasi publik, meningkatkan kepercayaan, serta mendukung keterbukaan informasi.
4. Pemanfaatan Data Statistik dalam Pemerintahan
 - 1) Indikator statistik menunjukkan capaian 100% untuk perencanaan maupun evaluasi pembangunan.
 - 2) Hal ini mengindikasikan budaya kerja berbasis data (evidence-based policy) sudah terbentuk kuat di lingkungan OPD Kota Magelang.
5. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah
 - 1) Indikator keterbukaan keuangan daerah konsisten 100%, namun indikator informasi belanja pelayanan mengalami penurunan signifikan pada 2023 (65,47%) sebelum kembali ke 100% (2024).
 - 2) Fluktuasi ini mencerminkan adanya masalah dalam konsistensi publikasi informasi yang disebabkan keterlambatan update data, keterbatasan kapasitas teknis, dan faktor koordinasi internal.
 - 3) Kondisi ini penting dicatat karena keterbukaan informasi belanja publik berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
6. Keamanan Informasi Pemerintah
 - 1) Indikator keamanan informasi menunjukkan tren peningkatan progresif tetapi belum optimal: dari 41,24% (2022) → 68,37% (2023–2024).

- 2) Meskipun terjadi perbaikan signifikan, capaian belum mencapai tingkat ideal (100%). Hal ini menunjukkan masih terdapat potensi kerentanan pada sistem informasi pemerintah.
- 3) Tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan standar keamanan menuju level yang sesuai dengan regulasi nasional (misalnya SPBE dan ISO 27001), memperkuat infrastruktur keamanan siber, dan meningkatkan kesadaran serta kapasitas SDM di bidang keamanan informasi.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2022 -2024

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan**	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.301.4 64.965	1.574.4 81.337	1.077.0 95.501	1.231.8 94.204	1.476.2 38.705	1.040.7 08.405	94,65%	93,76%	96,62%	-31,60%	-29,50%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.301.4 64.965	1.574.4 81.337	1.077.0 95.501	1.231.8 94.204	1.476.2 38.705	1.040.7 08.405	94,65%	93,76%	96,62%	-31,60%	-29,50%
Program Aplikasi Informatika	6.854.6 42.075	6.434.7 82.219	5.552.8 97.017	6.437.7 24.701	6.120.9 20.514	5.524.0 17.162	93,92%	95,12%	99,48%	-13,70%	-9,80%
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.377.1 91.000	4.892.6 15.394	4.464.5 55.228	5.134.5 21.719	4.606.7 88.894	4.439.4 02.520	95,49%	94,16%	99,44%	-8,70%	-3,60%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.477.4 51.075	1.542.1 66.825	1.088.3 41.789	1.303.2 02.982	1.514.1 31.620	1.084.6 14.642	88,21%	98,18%	99,66%	-29,40%	-28,40%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	663.67 6.000	433.859 .494	413.527 .840	649.019 .810	426.944 .002	412.621 .449	97,79%	98,41%	99,78%	-4,70%	-3,40%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	663.67 6.000	433.859 .494	413.527 .840	649.019 .810	426.944 .002	412.621 .449	97,79%	98,41%	99,78%	-4,70%	-3,40%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	292.35 7.000	222.248 .694	132.474 .628	273.653 .912	216.595 .364	123.266 .646	93,60%	97,46%	93,05%	-40,40%	-43,10%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.35 7.000	222.248 .694	132.474 .628	273.653 .912	216.595 .364	123.266 .646	93,60%	97,46%	93,05%	-40,40%	-43,10%
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan**	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.780.164.240	4.388.959.375	5.181.010.186	4.486.212.745	4.107.603.040	4.812.309.801	93,85%	93,59%	92,88%	18,00%	17,20%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.596.000	12.181.800	14.296.200	67.644.286	12.150.200	14.287.800	93,18%	99,74%	99,94%	17,40%	17,60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.701.992.240	3.733.991.681	4.511.862.139	3.551.090.443	3.544.008.847	4.188.128.301	95,92%	94,91%	92,82%	20,80%	18,20%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	260.389.000	7.530.000	11.221.100	232.727.150	7.486.000	11.147.000	89,38%	99,42%	99,34%	49,00%	48,90%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.300.000	203.777.900	180.505.200	262.715.793	198.114.198	180.057.811	93,39%	97,22%	99,75%	-11,40%	-9,10%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	73.450.795	0	0	71.590.000	#DIV/0!	#DIV/0!	97,47%	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.016.000	188.870.994	178.436.892	157.826.272	166.628.253	157.812.276	84,85%	88,22%	88,44%	-5,50%	-5,30%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.871.000	242.607.000	211.237.860	214.208.801	179.215.542	189.286.613	77,09%	73,87%	89,61%	-12,90%	5,60%

*Rata-Rata Pertumbuhan membandingkan tahun 2023 dan 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2022–2024, mayoritas program menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi dengan rasio realisasi rata-rata di atas 90%, seperti:

1. Program Aplikasi Informatika: realisasi mencapai >95% setiap tahun.
2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral: konsisten di atas 97%.
3. Administrasi Keuangan dan Perencanaan: stabil dan sangat mendekati 100%.

Hal ini menggambarkan bahwa perangkat daerah mampu menjalankan program dengan pemanfaatan anggaran yang optimal sesuai rencana kerja tahunan. Program penunjang urusan pemerintahan menunjukkan tren pertumbuhan positif secara anggaran (42,94%) dan realisasi (17,2%) selama lima tahun terakhir. Kegiatan seperti pengadaan barang dan penyediaan jasa penunjang meskipun fluktuatif, tetap menunjukkan upaya pelaksanaan tugas administrasi yang konsisten. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi tidak dijalankan setelah 2021.

c. Kelompok Sasaran Layanan

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kelompok Sasaran Layanan:

- 1) Perangkat Daerah: Dalam rangka mendukung pengelolaan TIK, penguatan SPBE, dan pemanfaatan sistem informasi pemerintahan.
- 2) Masyarakat Umum: Sebagai pengguna layanan informasi publik, literasi digital, dan aduan publik.
- 3) Media Massa dan Jurnalis: Untuk mendukung penyebaran informasi resmi pemerintah dan pengelolaan kemitraan media.
- 4) Pelaku UMKM & Startup Digital: Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran dan pengembangan usaha.
- 5) Penyedia Layanan Teknologi: Untuk kerja sama pengembangan infrastruktur dan layanan digital.
- 6) Kelompok rentan: individu atau komunitas yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial, ekonomi, atau lingkungan sehingga lebih berisiko mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar dan hak-hak publik.

2. Urusan Statistik

Kelompok Sasaran Layanan:

- 1) Perangkat Daerah: Pengguna data sektoral untuk perencanaan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan berbasis data.
- 2) Bappeda & Tim Evaluator Kinerja: Dalam pemanfaatan data statistik daerah dan indikator makro pembangunan.
- 3) Akademisi & Peneliti: Untuk riset sosial, ekonomi, dan evaluasi kebijakan lokal.
- 4) Masyarakat Umum: Dalam bentuk publikasi data terbuka, statistik sektoral, dan infografis pembangunan.
- 5) Kelompok rentan: individu atau komunitas yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial, ekonomi, atau lingkungan sehingga lebih berisiko mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar dan hak-hak publik.

3. Urusan Persandian

Kelompok Sasaran Layanan:

- 1) Perangkat Daerah: Pengguna layanan pengamanan informasi dan komunikasi dinas, terutama dalam surat-menyurat digital dan manajemen dokumen rahasia.
- 2) Aparatur Pemerintah: Penerima pelatihan dan sosialisasi pengamanan informasi dan enkripsi komunikasi.
- 3) Tim IT & Keamanan Sistem: Mitra dalam penerapan sistem keamanan siber pada jaringan pemerintahan daerah.

d. Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang senantiasa membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan pada periode 2021–2025. Pola kemitraan ini tidak hanya memperkuat posisi Diskominsta sebagai penggerak transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, tetapi juga memperluas dampak manfaat layanan publik yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif.

Pada lingkup pemerintah daerah dan instansi pusat, Diskominsta bekerja sama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data dalam implementasi program Satu Data Indonesia. Sejak tahun 2021, lebih dari 60 Produsen Data di Kota

Magelang berperan aktif dalam pengumpulan dan pemutakhiran data sektoral. Selain itu, koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat aspek metodologi dan literasi statistik, sementara kemitraan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) mendukung peningkatan keamanan informasi dan penerapan tanda tangan elektronik (TTE) di lingkungan pemerintah.

Dalam mendukung pengelolaan data spasial yang terintegrasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang menjalin kemitraan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk memiliki basis data geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan secara luas dalam perencanaan pembangunan daerah. Kemitraan ini tidak hanya memperkuat infrastruktur data di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam penyusunan kebijakan berbasis spasial, seperti tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, penataan infrastruktur, serta layanan publik berbasis lokasi. Dengan adanya dukungan BIG, Diskominsta Kota Magelang semakin siap menjadi simpul penting dalam penyelenggaraan informasi geospasial di tingkat daerah.

Dalam konteks antar daerah, Diskominsta menjalin perjanjian kerja sama (PKS) melalui inisiatif Portal Data Terbuka “DataGO” dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota, seperti Karanganyar, Tegal, dan Kendal. Kolaborasi ini memperkuat integrasi dan interoperabilitas data lintas wilayah.

Pada aspek kemasyarakatan, Diskominsta menggandeng Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FKMetra) sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi.

Selain itu, lembaga pendidikan dan akademisi, seperti Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Tidar, turut menjadi mitra dalam pelaksanaan seminar, kajian, dan penelitian di bidang komunikasi, informatika, dan statistik. Keterlibatan perguruan tinggi memberikan landasan akademis yang memperkaya inovasi kebijakan berbasis data.

Secara keseluruhan, jejaring mitra Diskominsta Kota Magelang pada periode 2021–2025 mencerminkan pendekatan kolaboratif lintas

sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Kemitraan ini memperkuat pondasi transformasi digital, sekaligus menjadikan Kota Magelang lebih adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

e. Mitra Badan Usaha Milik Daerah

Sebagai upaya memperkuat ekosistem layanan publik berbasis digital, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang tidak hanya menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan akademisi, tetapi juga membangun kemitraan strategis dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kolaborasi dengan BUMD. Diskominsta bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai produsen data dalam implementasi program *Satu Data Indonesia*. Dari lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi mitra sebagai produsen data hanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM berkontribusi tujuh data yang disajikan dalam bab 8 Buku Daerah Dalam Angka setiap tahunnya.

f. Kerjasama

Pada periode 2021–2025, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang membangun kerja sama strategis dengan berbagai pihak, mulai dari OPD, BPS, BIG, BSSN, hingga BSR E untuk penguatan tata kelola data dan keamanan informasi, serta dengan pemerintah daerah lain (Karanganyar, Tegal, Kendal) melalui integrasi data Portal DataGO. Diskominsta juga bermitra dengan KIM dan FKMetra dalam literasi digital dan komunikasi publik, serta melibatkan perguruan tinggi seperti UGM dan UNTIDAR dalam seminar, kajian, dan penelitian, sehingga tercipta kolaborasi komprehensif antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi guna memperkuat transformasi digital Kota Magelang.

Tabel 2.8

Kerjasama

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2021 -2025

Tahun	Mitra	Jenis Kerja Sama	Lingkup / Keterangan	Dasar
2021-2025	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang (±60 Produsen Data)	SK Walikota Pembentukan Tim	Pengumpulan, pemutakhiran, dan penyajian data sektoral daerah	Keputusan Walikota Magelang Nomor 481.5/012/112 Tahun 2022
2021-2025	Badan Pusat Statistik (BPS)	Nota Kesepakatan	Penguatan metodologi	130.13/18/111 Tahun 2024 dan 613/33710/HM.31

Tahun	Mitra	Jenis Kerja Sama	Lingkup / Keterangan	Dasar
		n (NK)	statistik, literasi data, dan sinkronisasi data sektoral	0/2024
2022-2024	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Nota Kesepakatan (NK)	Penyelenggaraan ,Pengembangan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Kota Magelang	130.13/22/111/ Tahun 2022 dan 18.1/KA-BIG/HK>01.03/8/2022
2021-2025	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement NDA)	Penguatan keamanan informasi dan asesmen keamanan sistem elektronik	-
2021-2025	Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Pemanfaatan tanda tangan elektronik (TTE) dalam tata kelola pemerintahan	048/583/320 dan PERJ.116/BSSN/BS/KH.02.01/09/2021
2022-2024	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Integrasi dan interoperabilitas data lintas daerah Portal DataGO	800.3/233/320; 415.4/07/PKS/III/2022; 08 TAHUN 2022 DAN 130/559/Diskominfo/2022
2022-2025	Pemerintah Kabupaten Tegal	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Integrasi dan interoperabilitas data lintas daerah Portal DataGO	800.3/233/320; 415.4/07/PKS/III/2022; 08 TAHUN 2022 DAN 130/559/Diskominfo/2022
2022-2026	Pemerintah Kabupaten Kendal	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Integrasi dan interoperabilitas data lintas daerah Portal DataGO	800.3/233/320; 415.4/07/PKS/III/2022; 08 TAHUN 2022 DAN 130/559/Diskominfo/2022
2024-2029	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kemitraan komunitas	Penyebarluasan informasi dan literasi digital masyarakat	SK Walikota Magelang nomor 488/196/112
2024-2029	Forum Komunikasi Media Tradisional (FKMetra)	Kemitraan komunitas	Penguatan media tradisional sebagai saluran komunikasi publik	SK Walikota Magelang nomor 480.1/128/112 Tahun 2024
2024	Universitas Gadjah Mada (UGM)	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Seminar, kajian, penelitian di bidang komunikasi, informatika, dan statistik	500.14/037/320 dan 206/UN1/FEB/KIAA/DL/2024
2023	Universitas Tidar (UNTIDAR)	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Seminar, kajian, penelitian di bidang komunikasi, informatika, dan statistik	074/493/320 dan B/1802/UN57.F2/KS.00.00/2023

Sumber: Diskominsta (diolah)

g. Inovasi Utama (2021–2025)

Pada periode 2021–2024, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang meluncurkan berbagai inovasi utama untuk mendukung transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Inovasi tersebut antara lain Magelang Cerdas/One Touch Portal dan Indi Go/DataGO pada 2021, Spandista serta MAGESTY (Magelang Smart City) pada 2022, yang kemudian diperkuat dengan DataGO Mobile pada 2023. Pada 2024, inovasi semakin berkembang melalui Qrista, Penjaminan Kualitas Data melalui Otomasi Validasi DataGO, serta penguatan kembali MAGESTY, seluruhnya berlandaskan Peraturan Wali Kota, sehingga membentuk ekosistem layanan digital yang semakin terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.9
Inovasi Utama
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2021 -2025

Tahun	Inovasi Utama	Dasar Hukum
2021	Magelang Cerdas / One Touch Portal	-
2021	Indi Go / DataGO – Pengendalian Inflasi Terintegrasi	-
2022	Sistem Pengelolaan Administrasi Dan Disposisi Surat Digital (Spandista)	Perwal Nomor 78 Tahun 2022
2022	MAGESTY (Magelang Smart City)	Perwal Nomor 78 Tahun 2022
2023	DataGo Mobile	Perwal Nomor 41 Tahun 2023
2023	Sistem Pengelolaan Administrasi Dan Disposisi Surat Digital (Spandista)	Perwal Nomor 41 Tahun 2023
2024	DataGo Mobile	Perwal Nomor 10 Tahun 2025
2024	Qrista (Qrcode Aset pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang)	Perwal Nomor 10 Tahun 2025
2024	Penjaminan Kualitas Data melalui Otomasi Validasi pada DataGo Kota Magelang	Perwal Nomor 10 Tahun 2025
2024	MAGESTY (Magelang Smart City)	Perwal Nomor 10 Tahun 2025

Sumber: Diskominsta (diolah)

1. Beberapa inovasi (DataGO, Magelang Cerdas) masuk dalam Top 10 dan Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional maupun provinsi.
2. DataGO meraih penghargaan dari KemenPANRB tahun 2024 sebagai salah satu inovasi berkelanjutan terbaik nasional dan mendapat Dana Insentif Fiskal 2025 sebesar Rp 1,89 miliar.

3. Kota Magelang berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu role model daerah dengan praktik baik smart city dan open data di Indonesia.

h. Penghargaan Penghargaan (2021-2025)

Berikut adalah daftar penghargaan yang diraih oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

2021

- Smart Society dari Gerakan Menuju 100 Smart City oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI – sebagai bagian dari inisiatif inovasi digital kota;



- Kota dengan Kesiapan Digital Terbaik dalam ajang Riset Rating Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2021;



- Top 8 Inovasi Pelayanan Publik yang Direplikasi se-Jawa Tengah untuk inovasi DataGO;



- SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kota Magelang mendapat nilai 2,71 dari Kementerian PANRB tahun 2021;
- Talkshow Terbaik dalam Anugerah Indonesia Persada.id Award II 2021, untuk program “Bincang Sehat Keluarga”. Acara ini digelar secara daring oleh Persatuan Radio dan TV Publik se-Indonesia.



2022

- Juara 1: Program Anak Radio Terbaik, lewat acara “Kak Eno dan Eni Jalan-Jalan” (Episode Dahulukan Mobil Ambulans di Jalan Raya);



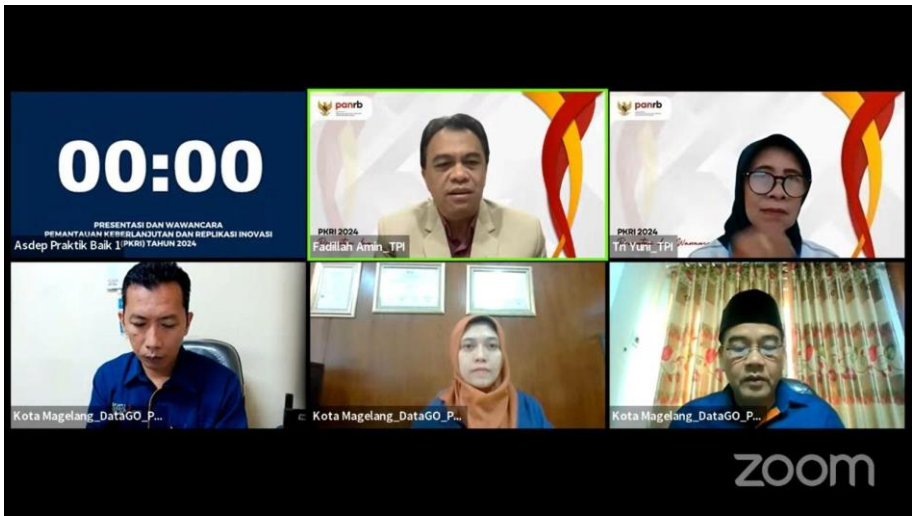
- Juara 2: Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Terbaik, dengan tema “Nglarisi Dagangane Tonggo”. Apresiasi ini datang dari Anugerah Penyiaran KPID Jawa Tengah 2022;

2023

- Predikat Kota Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai 95,3, melalui Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2023;

2024

- Top 5 Terbaik Nasional – Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) melalui inovasi DataGO (kelompok Keberlanjutan) dalam ajang Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, oleh KemenPANRB;



- Penghargaan Penyelenggara Inovasi Terbaik (Kelompok Keberlanjutan) – inovasi DataGO dari KemenPANRB (Gebyar Pelayanan Prima 2024);



- Penghargaan Anugerah Anindhita Wistara Data Terbaik Nasional 2024 dari BPS RI, kategori Pemerintah Kota, atas capaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);



2025

- Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp 1,89 miliar dari KemenPANRB sebagai penghargaan atas inovasi pelayanan publik (subkategori Sinergi Kebijakan Pemerintah), khususnya inovasi DataGO.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan saat ini dan lima tahun ke depan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang, disusun secara sistematis dalam bentuk tabel tiga lapis: *masalah pokok*, *masalah*, dan *akar masalah* untuk masing-masing urusan:

Tabel 2.10
Tabel Permasalahan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Sistem informasi antar-OPD belum terintegrasi	Sistem informasi OPD belum memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
		OPD Belum mengikuti arsitektur SPBE
		Belum dibuatnya Pembaharuan Arsitektur SPBE yang selaras dengan RPJMD terbaru
		Belum Tersedianya Data Center yang Sesuai Standar
	Banyak Infrastruktur TIK Sudah Usang	Keterbatasan anggaran dan SDM TIK
		Perkembangan TIK sangat cepat
	Layanan publik digital belum inklusif	Belum optimalnya koordinasi lintas OPD
	Informasi pembangunan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Strategi komunikasi belum berjalan optimal
	Partisipasi publik dalam kebijakan rendah	Kurangnya kanal komunikasi dua arah
	Kebutuhan data daerah belum terpenuhi	Kebutuhan data daerah dinamis
	Kapasitas statistik Produsen Data kurang optimal	Literasi dan diseminasi statistik belum terkelola optimal
	Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral OPD belum sesuai probis	Rekomendasi statistik tidak diusulkan sebelum perencanaan kegiatan
	Teknologi persandian belum diperbarui	Keterbatasan infrastruktur dan anggaran persandian
	Komunikasi internal belum terenkripsi secara menyeluruh	Belum adanya SOP pengamanan informasi yang baku

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Sistem keamanan informasi belum mutakhir	Belum diterapkannya manajemen risiko siber secara menyeluruh
	Risiko kebocoran data meningkat	Rendahnya kesadaran ASN terhadap keamanan informasi
	ASN belum memahami pentingnya enkripsi dan kerahasiaan data	Minimnya pelatihan dan sosialisasi keamanan informasi
		Belum ada audit keamanan informasi secara berkala
	Belum Optimalnya Kelembagaan Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah
		Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah
		Belum Optimalnya Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Perangkat Daerah

Sumber: Diskominsta (diolah)

a. Hubungan Isu Global, Nasional dan Regional

- Infrastruktur TIK Pemda

Pada level global, ancaman siber dan manipulasi informasi menjadi tantangan yang semakin meningkat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat keamanan infrastruktur digital. Di tingkat nasional, isu ini diterjemahkan ke dalam kewajiban implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Satu Data Indonesia, sebagai kerangka kerja terpadu untuk transformasi digital pemerintahan. Pada skala regional, ketimpangan penguatan SPBE antar kabupaten/kota masih menjadi masalah nyata, sehingga koordinasi dan pemerataan kapasitas digital antar daerah menjadi isu strategis. Isu global memaksa adanya standar keamanan, isu nasional menuntut keseragaman implementasi SPBE, sedangkan isu regional menggarisbawahi disparitas antar daerah yang harus diatasi melalui kolaborasi dan berbagi praktik baik.
- Komunikasi Publik

Perubahan global ditandai dengan tekanan transformasi digital yang sangat cepat, yang membuat cara komunikasi publik berubah drastis. Secara nasional, hal ini direspons dengan kewajiban transparansi dan akuntabilitas publik, agar komunikasi pemerintahan lebih terbuka dan dapat dipercaya. Namun, di regional, terbatasnya kolaborasi data lintas daerah masih menjadi hambatan, membuat komunikasi publik belum

efektif dan partisipatif. Dinamika global mendorong percepatan digitalisasi komunikasi, nasional menuntut transparansi, sementara regional menghadapi tantangan integrasi data. Jika dihubungkan, keberhasilan komunikasi publik daerah sangat bergantung pada kecepatan adaptasi terhadap teknologi global, pemenuhan regulasi nasional, dan kemampuan kolaborasi regional.

3. Satu Data Kota Magelang

Secara global, isu yang relevan adalah pentingnya memperkuat sarana pelaksanaan serta merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs). Data yang terbuka, akurat, dan dapat dipertukarkan menjadi instrumen utama. Pada tingkat nasional, agenda Satu Data Indonesia dan tata kelola pemerintahan akuntabel menjadi pendorong implementasi sistem data terpadu. Di tingkat regional, dinamika pemerintahan yang cepat menuntut tata kelola statistik sektoral yang rapi agar setiap kebijakan berbasis data dapat selaras antar daerah. Agenda global mendorong keterbukaan data, nasional memperkuat regulasi dan standardisasi, sementara regional menekankan harmonisasi statistik sektoral. Kota Magelang harus mampu menjembatani ketiganya untuk mewujudkan Satu Data yang berdaya guna.

4. Sistem Persandian Antar-OPD dan Keamanan Informasi

Walaupun pada tabel tidak disebutkan isu global yang spesifik, tren dunia memperlihatkan bahwa ancaman keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian serius. Di nasional, tuntutan layanan persandian antar lembaga semakin kuat untuk mendukung integrasi SPBE. Sementara di regional, masalah literasi digital dan komunikasi publik masih rendah, sehingga kesiapan SDM menjadi titik lemah. Tekanan global terhadap keamanan data berimplikasi pada tuntutan nasional untuk menyediakan sistem persandian yang andal. Namun, efektivitas di level daerah/regional akan sangat ditentukan oleh kapasitas SDM dan literasi digital.

Secara sistematis dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Isu global memberikan arah umum berupa tantangan dan peluang (ancaman siber, percepatan transformasi digital, keterbukaan data untuk SDGs).
- 2) Isu nasional menerjemahkan dinamika global ke dalam kewajiban regulasi dan kebijakan (SPBE, Satu Data Indonesia, transparansi publik, keamanan informasi).
- 3) Isu regional merefleksikan kesenjangan kapasitas dan kesiapan antar daerah (ketimpangan SPBE, keterbatasan kolaborasi, lemahnya literasi digital).
- 4) Dengan demikian, keberhasilan Dinas Kominfo dalam menghadapi isu-isu strategis bergantung pada kemampuan menyelaraskan standar global, kebijakan nasional, dan kondisi regional, serta memastikan transformasi digital yang inklusif, aman, dan berbasis data.

b. Telaah RPJMN 2025–2029

RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi digital sebagai prioritas pembangunan nasional, dengan fokus pada penguatan komunikasi publik, percepatan Satu Data Indonesia, dan peningkatan keamanan informasi. Telaah ini memetakan keterkaitan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 1) Arah RPJMN: peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Komunikasi Pembangunan, dan Indeks Transformasi Digital Nasional.
 - 2) Implikasi Daerah: optimalisasi PPID, penguatan kanal komunikasi publik berbasis digital, integrasi layanan smart city, dan modernisasi infrastruktur TIK.
2. Urusan Statistik
 - 1) Arah RPJMN: penguatan Satu Data Indonesia, harmonisasi data sektoral dengan BPS, serta perencanaan berbasis bukti.
 - 2) Implikasi Daerah: optimalisasi Diskominsta sebagai wali data, integrasi data sektoral dengan DataGo dan sistem nasional, serta peningkatan kualitas open data.

3. Urusan Persandian

- 1) Arah RPJMN: penguatan keamanan informasi, kolaborasi dengan BSSN, dan peningkatan manajemen keamanan SPBE.
- 2) Implikasi Daerah: penerapan TTE BSRé secara menyeluruh, audit keamanan sistem informasi, serta peningkatan kapasitas SDM persandian.

4. Rekomendasi Strategis

- 1) Memperkuat komunikasi publik dan literasi digital untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
- 2) Menyempurnakan implementasi Satu Data Indonesia melalui integrasi data sektoral dan portal DataGo.
- 3) Memperkuat keamanan informasi dengan penerapan standar persandian, TTE, dan audit berkala.
- 4) Mendorong transformasi digital dan smart city sebagai instrumen utama peningkatan layanan publik.

Dengan menyelaraskan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, Diskominfo Kota Magelang dapat berperan sebagai motor penggerak transformasi digital daerah, memperkuat tata kelola data, dan menjamin keamanan informasi, sehingga mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan adaptif.

c. Telaah VISI MISI Walikota Magelang

Berdasarkan Visi 2025 – 2030 Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis Humanis Nyaman dan Berkelanjutan, dan Misi:

1. Menciptakan Masyarakat yang Bermatabat;
2. Meningkatkan Infrastruktur yang Inovatif dan Berawawasan Lingkungan;
3. Menciptakan Keharmonisan Antar Umat Beragama;
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Perekonomian dan Pariwisata yang Berdaya Saing;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diturunkan menjadi tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang berperan dalam pencapaian tujuan 4 RPJMD yaitu Menetapkan arah pembangunan

untuk mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan akuntabel. Sasaran 4.1 menekankan pentingnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Misi 6 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagi Diskominsta, mandat ini bermakna strategis karena menegaskan peran dinas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital (SPBE), meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi cerdas, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi. Implementasi reformasi birokrasi di tingkat daerah harus ditopang dengan pengelolaan data yang andal, komunikasi publik yang transparan, serta sistem keamanan informasi yang kuat.

Dengan demikian, Diskominsta memiliki tanggung jawab kunci untuk:

1. Mengoptimalkan penerapan Satu Data Indonesia dan Portal DataGo guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
2. Memperkuat peran PPID serta kanal komunikasi publik untuk meningkatkan transparansi dan inklusivitas layanan.
3. Mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi layanan publik yang efisien dan mudah diakses.
4. Menjamin keamanan informasi dan pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan digital.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ini menjadi pijakan bagi Diskominsta dalam merancang Renstra 2025–2029 yang berfokus pada digitalisasi birokrasi, keterbukaan informasi, serta keamanan data, demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Magelang yang bersih, profesional, dan partisipatif.

d. Telaah RENSTRA Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029

Dalam RPJMN Buku III yang memuat matriks kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025–2029. Indikator kinerja yang digunakan adalah:

1. PP01.02 Indeks Kemerdekaan Pers
Baseline 2024: 69,36 | Target 2025: 70,00 | Target 2029: 72,00.
Kenaikan moderat, menunjukkan ruang kebebasan pers cukup stabil namun perlu penguatan.

2. PP01.02 Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Baseline 2024: 75,65 | Target 2025: 76,00 | Target 2029: 77,25.
Sudah relatif tinggi, tantangan ada pada pemerataan kualitas di daerah.
3. PP01.02 Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik
Baseline 2023: 69,80 | Target 2025: 71,00 | Target 2029: 75,00.
Peningkatan cukup signifikan, penting untuk trust building.
4. PP03.02 Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional
Baseline 2023: 5,90 | Target 2025: 6,10 | Target 2029: 6,30.
Masih rendah, tantangan besar pada kesenjangan digital.
5. PP03.02 Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Baseline 2022: 49,20 | Target 2025: 50,80 | Target 2029: 52,53.
Perlu percepatan untuk mendukung Indonesia Emas 2045.
Kelima indikator saling melengkapi dan membentuk ekosistem digital nasional. Indeks Kemerdekaan Pers dan Keterbukaan Informasi Publik memperkuat demokrasi digital. Indeks Komunikasi Pembangunan menjadi jembatan partisipasi publik. Indeks Pembangunan TIK dan Transformasi Digital memperlihatkan kesiapan infrastruktur dan pemanfaatannya.

e. Telaah RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah 2025–2029

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks SPBE menunjukkan tren peningkatan dari 4,42 pada baseline menjadi 4,69 pada akhir periode. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Meski peningkatan relatif kecil (0,27 poin selama 5 tahun), tren ini mengindikasikan keberlanjutan transformasi digital di sektor pemerintahan.
2. Tingkat Kematangan Layanan Tata Kelola Data
Indeks ini relatif stabil di angka 4,85 dan meningkat sedikit menjadi 4,95 pada akhir periode. Stabilitas ini menunjukkan bahwa layanan tata kelola data sudah mendekati kematangan penuh, sehingga fokus ke depan adalah mempertahankan kualitas dan konsistensi implementasi.
3. Tingkat Kematangan Pemanfaatan Infrastruktur TIK
Indeks pemanfaatan infrastruktur TIK menunjukkan peningkatan lebih signifikan, dari 3,95 pada awal periode

menjadi 4,25 pada akhir periode. Hal ini menandakan adanya percepatan dalam pemanfaatan sarana TIK, yang mendukung integrasi layanan digital dan memperkuat fondasi transformasi digital daerah.

4. Secara umum, data menunjukkan arah pembangunan digital Jawa Tengah yang konsisten menuju pemerintahan digital yang matang. Tantangan terbesar ada pada percepatan infrastruktur TIK agar dapat menyeimbangi stabilitas tata kelola data dan implementasi SPBE. Dengan demikian, strategi ke depan perlu menekankan pada penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta menjaga keberlanjutan kualitas layanan data dan SPBE.

f. Keselarasan RTRW

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang tidak dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam lima tahun mendatang. Hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang tidak memiliki indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam dokumen RTRW Kota Magelang.

g. Hubungan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang dengan KLHS

Berdasarkan KLHS Kota Magelang 2025-2029, kondisi capaian indikator TPB menunjukkan kebutuhan untuk upaya tambahan untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan perkotaan. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang yang menjadi masukan untuk penyusunan Renstra adalah Tata Kelola dan Layanan Pemerintah.

Secara keseluruhan isu tata kelola dan layanan pemerintah di Kota Magelang berupa belum optimalnya kinerja pemerintah dalam tata kelola dan layanan yang efektif. Optimalisasi kinerja pemerintah melalui keberhasilan pada semua indikator reformasi birokrasi perlu untuk dilakukan, sebab indeks reformasi birokrasi merujuk pada kinerja pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pada tahun 2021-2025, pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang turut mendukung perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya pada Tujuan 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh. Pada tujuan tersebut terdapat tiga indikator yang menjadi parameter keberhasilan layanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Indikator yang pertama yaitu tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan capaian yang baik. Sejak tahun 2016 Pemerintah Kota Magelang selaku Badan Publik telah mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mendukung implementasi UU No. 14 Tahun 2008. Hal tersebut didukung oleh komitmen Pemkot Magelang dalam perumusan kebijakan keterbukaan informasi dengan diundangkannya Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang. Kinerja layanan publik menghantarkan Pemkot Magelang dalam evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada kategori Informatif.

Indikator kedua yaitu persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi, tercapai dengan baik dengan nihilnya sengketa yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2021-2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa praktik keterbukaan informasi di Kota Magelang sudah baik sehingga tidak berpotensi menimbulkan sengketa informasi yang berarti.

Indikator ketiga Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Mengukur Kualitas PPID dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan sudah terdapat 13 (tiga belas) sertifikat yang dimiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sampai dengan tahun 2024. Kepemilikan sertifikat ini ditujukan untuk menjamin kualitas pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Magelang.

h. Tantangan dan Peluang Diskominsta Kota Magelang

Tantangan

1. Integrasi Sistem dan Infrastruktur TIK

Walaupun capaian SPBE meningkat signifikan, integrasi sistem antar-OPD masih menghadapi kendala. Beberapa aplikasi belum sepenuhnya mengikuti arsitektur SPBE nasional, sementara infrastruktur seperti data center dan jaringan perlu ditingkatkan agar memenuhi standar keamanan dan keandalan. Tantangan lain adalah kecepatan perkembangan teknologi yang sering kali melampaui kemampuan adaptasi organisasi.

2. Keamanan Informasi dan Persandian

Ancaman siber global semakin kompleks, sementara tingkat kematangan keamanan informasi di Kota Magelang baru mencapai 68,37%. Hal ini menunjukkan masih ada celah kerentanan, baik dari sisi infrastruktur maupun kesadaran SDM. Minimnya audit berkala, terbatasnya SOP baku, serta kurangnya literasi keamanan informasi di kalangan ASN menjadi tantangan serius.

3. Literasi Digital dan Inklusivitas Layanan Publik

Transformasi digital layanan publik menunjukkan lonjakan capaian, namun fluktuasi di tahun 2024 menandakan persoalan sustainabilitas. Layanan publik digital juga belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi kelompok rentan. Literasi digital masyarakat yang belum merata memperbesar risiko kesenjangan dalam pemanfaatan layanan.

4. Kualitas dan Kapasitas SDM

Dengan 35 ASN dan 17 non-ASN, Diskominsta masih menghadapi mismatch antara kompetensi dengan jabatan, khususnya pada bidang fungsional. Terbatasnya pelatihan teknis, khususnya di bidang keamanan siber, big data, dan integrasi aplikasi, menjadi hambatan dalam mendukung percepatan digitalisasi.

5. Perkembangan dan Keterbukaan Data

Walaupun Portal DataGo berhasil menjadi role model, tantangan masih muncul terkait cepatnya perkembangan atas kebutuhan data set yang menyebabkan kondisi lanjutan yaitu konsistensi update data sektoral, kesesuaian metodologi, dan kualitas metadata. Rendahnya koordinasi lintas OPD dalam penyusunan rekomendasi statistik juga berdampak pada belum optimalnya Satu Data Indonesia di tingkat kota.

Peluang

1. Momentum Transformasi Digital Nasional

RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi digital sebagai prioritas nasional. Hal ini membuka peluang besar bagi Diskominsta untuk mengakses dukungan kebijakan, anggaran, serta program strategis yang mempercepat integrasi SPBE, open data, dan smart city.

2. Inovasi dan Reputasi Kota Magelang

Inovasi DataGO, Magelang Cerdas, dan MAGESTY yang memperoleh penghargaan nasional memperkuat posisi Kota Magelang sebagai role model smart city dan open data. Citra positif ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas kolaborasi dengan daerah lain, akademisi, dan sektor swasta.

3. Kemitraan Strategis Multisektor
Jejaring kerja sama dengan BPS, BIG, BSSN, BSrE, hingga perguruan tinggi membuka peluang peningkatan kapasitas metodologis, keamanan informasi, dan pengembangan inovasi berbasis riset. Kemitraan dengan KIM, FKMetra, serta media lokal juga memperkuat penetrasi komunikasi publik.
4. Potensi Penguatan Ekosistem Data dan Smart City
Dengan basis Portal DataGo, Diskominsta berpeluang mengembangkan layanan berbasis big data, AI, dan integrasi data spasial. Ekosistem ini tidak hanya mendukung perencanaan pembangunan, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik.

B. Isu Strategis Lima Tahun ke Depan (2025–2029)

Dalam menghadapi tantangan era digital dan perkembangan kebijakan global, nasional, regional Diskominsta Kota Magelang berada pada titik krusial untuk memainkan peran sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, dan berbasis data. Seiring dengan meningkatnya tuntutan layanan publik yang terintegrasi dan responsif, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu dijawab dalam lima tahun mendatang:

Tabel 2.11
Tabel Isu Strategis
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Infrastruktur TIK Pemda	- Sistem informasi antar-OPD belum terintegrasi - Banyak Infrastruktur TIK Sudah Usang - Layanan publik digital belum inklusif	Tata Kelola dan Layanan Pemerintah	Ancaman siber internasional dan perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut sistem yang adaptif dan aman.	Implementasi SPBE dan Satu Data Indonesia sebagai kerangka kerja transformasi digital nasional.	Ketimpangan kesiapan infrastruktur TIK antar daerah, integrasi sistem antar-OPD masih belum merata.	Sistem informasi antar-OPD belum sepenuhnya terintegrasi; belum tersedia Data Center sesuai standar; beberapa infrastruktur TIK sudah usang.
Komunikasi Publik	- Informasi pembangunan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat - Partisipasi publik dalam	Tata Kelola dan Layanan Pemerintah	Perubahan pola komunikasi akibat transformasi digital global, meningkatnya	Kewajiban transparansi dan akuntabilitas publik sesuai UU KIP dan penguatan PPID.	Terbatasnya kolaborasi lintas daerah dan keterbatasan kanal komunik	Strategi komunikasi pemerintah belum optimal; masih rendahnya partisipasi publik; belum semua lapisan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	kebijakan rendah		penggunaan media sosial, serta risiko hoaks/disinformasi.		asi publik yang partisipatif.	masyarakat terjangkau informasi pembangunan.
Satu Data Kota Magelang	- Kebutuhan data daerah belum terpenuhi - Kapasitas statistik Produsen Data kurang optimal - Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral OPD belum sesuai probis	Tata Kelola dan Layanan Pemerintah	Tuntutan global terhadap keterbukaan data untuk SDGs, serta tren data-driven policy making.	Agenda Satu Data Indonesia, sinkronisasi dengan BPS, serta peningkatan kualitas open data.	Kebutuhan harmonisasi data sektoral antar daerah dan sinkronisasi metodologi statistik.	Kualitas literasi dan diseminasi statistik belum optimal; koordinasi produsen data kurang maksimal; rekomendasi statistik belum terintegrasi dalam perencanaan OPD.
Sistem persandian antar-OPD	- Teknologi persandian belum diperbarui - Komunikasi internal belum terenkripsi secara menyeluruh - Sistem keamanan informasi belum mutakhir - Risiko kebocoran data meningkat - ASN belum memahami pentingnya enkripsi dan kerahasiaan data - Belum Optimalnya Kelembagaan Perangkat Daerah	Tata Kelola dan Layanan Pemerintah	Ancaman kebocoran data dan serangan siber global yang semakin kompleks.	Tuntutan penerapan manajemen keamanan informasi sesuai standar nasional (BSSN, TTE BSR, ISO 27001).	Rendahnya literasi keamanan siber di daerah serta keterbatasan kapasitas SDM.	Teknologi persandian belum diperbarui; komunikasi internal belum sepenuhnya terenkripsi; belum ada audit keamanan informasi berkala; kesadaran ASN terkait keamanan data masih rendah.

Sumber: Diskominsta (diolah)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi Misi Kota Magelang Tahun 2025-2029, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang mendukung pencapaian unsur Tujuan, Sasaran dan Misi melalui Tujuan ke-4 yaitu **Terwujudnya pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan akuntabel** yang diturunkan dalam Sasaran 4.1 yaitu **Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan**. Selain itu juga mendukung Misi 6 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik** dengan arah kebijakan **Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Kinerja, Teknologi, Cerdas dan Parsipatif**. Berpijak pada keterkaitan tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang adalah sebagai berikut:

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam jangka waktu tahun 2025-2029 adalah: **Meningkatkan layanan TIK publik yang berkualitas dan berkelanjutan**. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam jangka waktu tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya tata kelola teknologi informatika;
2. Meningkatnya tata kelola keamanan informasi;
3. Meningkatnya layanan informasi publik dan media;

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja jangka menengah tahun 2025-2029 pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang dirinci pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
 Tahun 2024 -2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran							KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan											
	Meningkatkan layanan TIK publik yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks SPBE	3,69	3,7	3,72	3,73	3,75	3,76	3,78	Nilai Evaluasi SPBE
		Meningkatn ya tata kelola Teknologi Informasi	Tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3	3	3	3	3	3	3	a. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. b. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. c. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: 1. Perencanaan; 2. Analisis; 3. Desain; 4. Implementasi; dan,

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran							KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											5. Pemeliharaan. Siklus bisa menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM).
			Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah	4	4	4	4	4	4	4	a. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. b. Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran							KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
			Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah	3	3	3	3	3	3	3	a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup pemanfaatan dan pengoperasian,

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran							KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											serta terdokumentasi secara formal.
		Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan manajemen Keamanan SPBE	4	4	4	4	4	4	4	a. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE. b. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi. c. Penerapan Keamanan Informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.
			Tingkat kematangan Pelaksanaan audit	3	3	3	3	3	3	3	a. Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran							KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			infrastruktur SPBE								berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE. b. Audit Infrastruktur SPBE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis antara lain: 1. penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE; 2. infrastruktur SPBE; 3. kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan; dan 4. aspek infrastruktur SPBE lainnya.
			Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Aplikasi SPBE	3	3	3	3	3	3	3	a. Audit Aplikasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE. b. Audit Aplikasi SPBE terdiri atas: 1. Audit Aplikasi Umum 2. Audit Aplikasi Khusus c. Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran							KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Keamanan SPBE	2	2	2	2	2	2	2	a. Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. b. Audit Keamanan SPBE terdiri atas: 1. Audit Keamanan Aplikasi; dan 2. Audit Keamanan Infrastruktur. d. Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional.
		Meningkatnya Layanan Informasi Publik dan Media	Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	4	4	4	4	4	4	4	. Pengaduan Pelayanan Publik adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran							KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											pengaduan pelayanan publik di Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
			Tingkat kematangan layanan data terbuka	5	5	5	5	5	5	5	a. Data Terbuka(Open Data) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Data Terbuka merupakan sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat di bagi pakai oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. c. Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Sumber: Diskominsta (diolah)

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

A. Strategi

Strategi menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang menerapkan strategi terkait penyelenggaraan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Perumusan strategi ini telah didasarkan pada kajian faktor internal dan eksternal yang selaras dengan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Berdasarkan pemetaan dan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/ tantangan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang menentukan strategi untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki melalui analisa strategis SWOT. Analisa strategi tersebut tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Strategi Berdasarkan Analisis SWOT
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang

	S	W
	Infrastruktur TIK Pemda	Sistem informasi antar-OPD belum terintegrasi
	Komunikasi Publik	Banyak Infrastruktur TIK Sudah Usang
	Satu Data Kota Magelang	Layanan publik digital belum inklusif
	Sistem persandian antar-OPD	Informasi pembangunan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat
		Partisipasi publik dalam kebijakan rendah
		Kebutuhan data daerah belum terpenuhi
		Kapasitas statistik Produsen Data kurang optimal
		Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral OPD belum sesuai probis
		Teknologi persandian belum diperbarui
		Komunikasi internal belum terenkripsi secara menyeluruh
		Sistem keamanan informasi belum mutakhir
		Risiko kebocoran data meningkat
		ASN belum memahami pentingnya enkripsi dan kerahasiaan data
		Belum Optimalnya Kelembagaan Perangkat Daerah
O	SO	WO
Momentum Transformasi Digital Nasional	Penguatan Infrastruktur TIK untuk mendukung SPBE	Integrasi Sistem Informasi dengan Dukungan Kebijakan Nasional
Inovasi dan Reputasi Kota Magelang	Optimalisasi DataGO sebagai branding Kota Magelang	Modernisasi Infrastruktur TIK
Kemitraan Strategis Multisektor	Pengembangan layanan publik digital inklusif	Peningkatan Kapasitas Statistik dan Literasi Data
Potensi Penguatan Ekosistem Data dan Smart City	Pemanfaatan kemitraan strategis	Peningkatan Inklusivitas Layanan Publik Digital
T	ST	WT
Integrasi Sistem dan Infrastruktur TIK	Pemantapan Sistem Persandian dan Keamanan Informasi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur di Bidang Keamanan dan Teknologi Digital
Keamanan Informasi dan Persandian	Optimalisasi Portal DataGo untuk Menjaga Konsistensi Keterbukaan Data	Percepatan Pembaruan Infrastruktur Persandian dan Sistem Keamanan Informasi
Literasi Digital dan Inklusivitas Layanan Publik	Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan untuk Menjaga Kualitas Layanan Digital	Reformulasi Strategi Komunikasi Publik untuk Mengatasi Rendahnya Partisipasi Masyarakat
Kualitas dan Kapasitas SDM		Penguatan Kelembagaan Diskominsta
Perkembangan dan Keterbukaan Data		

Sumber: Diskominsta (diolah)

Tabel 3.3
 Tahapan Strategi
 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang
 Tahun 2026-2030

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Penguatan kelembagaan statistik sektoral/spasia 1	Perluasan penyediaan data mikro	Penyempurnaan platform repository dan diseminasi statistik	Penguatan implementasi berbagi pakai data statistik	Penguatan implementasi big data
Pengembangan sarana dan prasarana TIK Sesuai Standar	Peningkatan sarana dan prasarana TIK Sesuai Standar	Pemantapan sarana dan prasarana TIK Sesuai Standar	Perwujudan sarana dan prasarana TIK Sesuai Standar;	Optimalisasi Pelayanan TIK untuk Internal dan Eksternal
Optimalisasi Publikasi kebijakan Pemerintah	Optimalisasi Publikasi kebijakan Pemerintah	Optimalisasi Publikasi kebijakan Pemerintah	Optimalisasi Publikasi kebijakan Pemerintah	Optimalisasi Publikasi kebijakan Pemerintah
Pengembangan Persandian untuk pengamanan informasi dan dokumen	Peningkatan Persandian untuk pengamanan informasi dan dokumen	Pemantapan Persandian untuk pengamanan informasi dan dokumen	Perwujudan Persandian untuk pengamanan informasi dan dokumen	Penguatan Persandian untuk pengamanan informasi dan dokumen

Sumber: Diskominsta (diolah)

B. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang. Berbagai arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang
Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
	Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Kinerja, Teknologi Cerdas, dan Partisipatif	Meningkatkan cakupan dan kualitas penerapan e-government	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Perluasan cakupan dan pengelolaan jaringan intra pemerintah	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Percepatan integrasi proses bisnis dan sistem layanan publik	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Perwujudan smart city	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Pemantapan regulasi	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatkan Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Urusan Persandian
			Menguatkan Persandian Daerah;	Urusan Persandian
			Kampanye Literasi Keamanan Informasi;	Urusan Persandian
			Meningkatkan Manajemen Risiko Siber;	Urusan Persandian
			Melakukan Transformasi Layanan Informasi Publik;	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatkan Manajemen Media Pemerintah;	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatkan Kemitraan Media dan Komunitas;	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi;	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Optimalisasi peran PPID;	Urusan Komunikasi

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
				Dan Informatika
			Peningkatan kualitas layanan publik;	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Peningkatan efektifitas dan efisiensi kanal informasi;	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Peningkatan literasi informasi dan literasi digital masyarakat;	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Mengembangkan jenis platform informasi yang menyentuh langsung masyarakat;	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir;	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah;	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			Optimalisasi forum satu data Kota Magelang;	Urusan Statistik
			Pemantapan komitmen dan regulasi satu data dan satu peta Kota Magelang;	Urusan Statistik
			Integrasi portal satu data dan geoportal Kota Magelang dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monev dan SAKIP;	Urusan Statistik
			Peningkatan kapasitas Produsen Data;	Urusan Statistik
			Peningkatan validitas data statistik dan spasial;	Urusan Statistik
			Mengintegrasikan data sektoral Perangkat Daerah melalui portal satu data daerah;	Urusan Statistik
			Memperkuat peran walidata;	Urusan Statistik
			Menggunakan data statistik dan spasial	Urusan Statistik

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
			untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy);	
			Optimalisasi sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Urusan Kesekretariatan
			Pengembangan Kapasitas SDM Perangkat Daerah	Urusan Kesekretariatan
			Optimalisasi Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Perangkat Daerah	Urusan Kesekretariatan

Sumber: Diskominsta (diolah)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Penyusunan indikasi rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Magelang Tahun 2025-2029 sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan							
	Meningkatkan layanan TIK publik yang berkualitas dan berkelanjutan				Indeks SPBE		Nilai Evaluasi SPBE
		Meningkatnya tata kelola Teknologi Informasi			Tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE		a. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. b. Pembangunan Aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. c. Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: 1. Perencanaan; 2. Analisis; 3. Desain; 4. Implementasi; dan, 5. Pemeliharaan. Siklus bisa menggunakan salah satu framework yang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM).
					Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah		a. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. b. Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. c. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
					Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah		a. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. b. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE Penilaian dilakukan terhadap bukti dukung penerapan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria ruang lingkup pemanfaatan dan pengoperasian, serta terdokumentasi secara formal.
			Terwujudnya Pengelolaan TIK yang terintegrasi, andal, dan responsif guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien		Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	▪ Pembilang Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ▪ Penyebut Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		▪ Pembilang Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Kab/kota
					Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)		▪ Pembilang Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah
				Fasilitasi nama sub domain	Persentase OPD yang terfasilitasi nama sub domain	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	▪ Pembilang Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi nama sub domain ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1. Bentuk pengelolaan Nama Domain pemerintah daerah merupakan pendaftaran dan penggunaan Nama Domain .go.id untuk alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional. 2. Bentuk pengelolaan namadomain pemerintah desa merupakan pendaftaran dan penggunaan Nama

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Domain .desa.id untuk alamat resmi pemerintah 3. Sub domain merupakan turunan dari nama domain go.id dan .id yang digunakan oleh semua perangkat daerah. Perhitungan indikator: Hitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa yang telah disusun
				Penggunaan SPBE	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	▪ Pembilang - Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE ▪ Penyebut - Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. 2. Manajemen SPBE terdiri dari: - manajemen - manajemen keamanan - manajemen - manajemen aset Teknologi Informasi dan - manajemen sumber daya - manajemen - manajemen dan - manajemen Layanan SPBE. Perhitungan indikator: Hitung Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. Jaringan intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. 2. Dinas di tingkat Pemerintah Daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah provinsi dan jaringan intra Pemerintah Daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut melalui Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Perhitungan Indikator: Hitung jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	"1. Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan/atau Emergency Operation Center. 2. Pusat Kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem. 3. Dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional adalah dokumen yang membuktikan keterhubungan jaringan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional. Perhitungan Indikator: Hitung jumlah dokumen terkait keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional"

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	1. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar SPBE di internal Pemerintah Daerah. 2. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. Perhitungan indikator: Hitung jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	1. Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan Indikator: Hitung jumlah Perangkat Daerah/UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah harus memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan. 2. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. 3. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. 4. Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Anggaran untuk penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah dituangkan dalam dokumen rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah. Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah harus dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. 5. Dinas melaksanakan fasilitasi koordinasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Perhitungan indikator: Hitung jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Sub kegiatan ini mengakomodir sub kegiatan: 1. Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 2. Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 3. Koordinasi penyusunan proses bisnis
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	1. Kabupaten/Kota Cerdas adalah Kabupaten/Kota yang mengembangkan dan mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan daerah melalui inovasi yang terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Melaksanakan Sosialisasi Program Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas kepada perangkat daerah di pemerintahan Kabupaten/Kota 3. Jumlah dokumen masterplan Kabupaten/Kota cerdas yang disusun Pemerintah Kabupaten/Kota 4. jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas yang dilaksanakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Perhitungan Indikator: Hitung jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas
		Meningkatnya Tata kelola Keamanan Informasi			Tingkat Kematangan Penerapan manajemen keamanan SPBE		a. Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE. b. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi. c. Penerapan Keamanan Informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi.
					Tingkat kematangan Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE		a. Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							b. Audit Infrastruktur SPBE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis antara lain: 1. penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE; 2. infrastruktur SPBE; 3. kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan; dan 4. aspek infrastruktur SPBE lainnya.
					Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Aplikasi SPBE		a. Audit Aplikasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE. b. Audit Aplikasi SPBE terdiri atas: 1. Audit Aplikasi Umum 2. Audit Aplikasi Khusus c. Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional.
					Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Keamanan SPBE		a. Audit Keamanan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. b. Audit Keamanan SPBE terdiri atas: 1. Audit Keamanan Aplikasi; dan 2. Audit Keamanan Infrastruktur. d. Standar/pedoman audit dapat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							berupa standar internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional.
			Terwujudnya pengamanan informasi pemerintah daerah		Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	▪ Pembilang Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, setelah diverifikasi. ▪ Penyebut Jumlah nilai Optimal Indeks KAMI (918).
				Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	▪ Pembilang Jumlah OPD yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi ▪ Penyebut Jumlah OPD
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi. 2. Pelaksanaan Pengamanan Informasi Berbasis Elektronik meliputi identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan. 3. Pelaksanaan Pengamanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Informasi Berbasis Non Elektronik dilakukan dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
				Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	1. Jenis Layanan Keamanan Informasi meliputi identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik, asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik, penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik, fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik, audit Keamanan Sistem Elektronik (audit keamanan SPBE), pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi, penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik, forensik digital, literasi Keamanan Informasi, jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya. 2. Layanan Keamanan Informasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas kepala daerah dan wakil, perangkat daerah, pegawai atau aparatur sipil negara pada pemerintah daerah, dan pihak lainnya. 3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 4. Audit keamanan SPBE adalah audit yang dilakukan terhadap keamanan obyek pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu Aplikasi dan Infrastruktur. Audit Keamanan SPBE dilakukan secara bertahap mulai dari Audit Internal Kam SPBE oleh Inspektorat Pemda dan Audit Eksternal Kam SPBE yang dilaksanakan oleh Latik Swasta/Latik Pemerintah (BSSN) untuk mendukung nilai Indeks SPBE indikator 31. Audit ini merupakan bagian dari audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang akan menjadi proses evaluasi sistematis terhadap aset SPBE. Audit SPBE dilakukan untuk mengukur seberapa baik aplikasi dan infrastruktur SPBE tersebut mematuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Kebijakan Makro, Meso maupun Mikro.
		Meningkatnya Layanan			Tingkat kematangan		. Pengaduan Pelayanan Publik adalah serangkaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Informasi Publik dan Media			layanan pengaduan pelayanan publik		proses untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
			Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Perhitungan penilaian keterbukaan informasi badan publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
				Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dikelola	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	▪ Pembilang Jumlah informasi publik yang dikelola tahun n ▪ Penyebut Jumlah informasi publik yang harus tersedia sesuai uu no 14 th 2008
				Terjalannya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	1. Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengelolaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan diseminasi informasi. Perhitungan Indikator: Hitung jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
				Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	-Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik - Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan penyediaan informasi publik -Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
				Dokumen Rekomendasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	- Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam meliputi: a. pemantauan informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah b. pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial c. pengumpulan pendapat umum d. pemantauan aduan masyarakat Dari kegiatan huruf (a), (b), (c) dan (d) akan dilakukan evaluasi Isu yang menghasilkan rekomendasi, dan penyusunan agenda komunikasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							prioritas Pemerintah Daerah. - Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah rekomendasi harian
				Informasi yang tersampaikan	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	1. Khalayak yang terpapar informasi yaitu orang yang mendapatkan informasi publik, dalam hal ini adalah Masyarakat Perhitungan Indikator: Hitung jumlah khalayak yang terpapar informasi dibagi jumlah target khalayak dalam strategi komunikasi dikali 100%
				Terkelolanya media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah media komunikasi yang: - dimiliki pemerintah maupun media berbayar -dikelola sesuai dengan kriteria/ dan - dapat diakses oleh khalayak
				Konten Informasi Publik	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	- Penyusunan konten adalah proses menghasilkan produk dari ide-ide topik agenda komunikasi dalam berbagai bentuk media agar sesuai dengan target khalayak -Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah konten yang disusun sesuai Strategi komunikasi
				Pelatihan Bidang Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	- kegiatan pengembangan kapasitas SDM KP - penyediaan dan pemberian konsultasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik. - Rumus Penghitungan Indikator: Jumlah ASN bidang komunikasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							publik yang difasilitasi mengikuti Bimtek/pelatihan
					Tingkat kematangan layanan data terbuka		a. Data Terbuka(Open Data) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Data Terbuka merupakan sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat di bagi pakai oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. c. Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
			Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	▪ Pembilang Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					daerah		menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan perangkat daerah.
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		▪ Pembilang Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah.
				Terpenuhinya kebutuhan data daerah	Persentase pemenuhan data daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen
				Terpenuhinya Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk		kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan statistik melalui serangkaian tahapan proses bisnis statistik, upaya pengembangan ilmu statistik, dan/atau upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Struktur dan format baku dari metadata statistik mencakup metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektornik yang saling terintegrasi. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama. Jumlah dan daftar kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan di Pemerintah Daerah perlu diidentifikasi terlebih dahulu, dapat berkoordinasi dengan BPS sebagai pembina statistik sektoral
				Akses data melalui portal data terintegrasi	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. Akses data melalui portal data terintegrasi. Pengguna data tidak harus publik/umum, namun disesuaikan dengan sifat/klasifikasi data, mencakup data: sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan terbuka.
				Pelatihan di bidang statistik	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di pemerintah daerah yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain yang kompeten.
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Perangkat Daerah		SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian sakip internal oleh inspektorat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kematangan Organisasi Daerah		Tingkat kemampuan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien
					Pengawasan Kearsipan Internal		Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan
					Manajemen Risiko Indeks (MRI)		Proses pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola risiko yang terkait operasional dan kegiatan perangkat daerah
				Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun dalam kurun waktu 1 tahun Dokumen perencanaan terdiri dari Renstra PD, Renja PD, Perubahan Renja PD
					Persentase Dokumen Penganggaran SKPD yang Disusun		Persentase Dokumen Penganggaran SKPD yang Disusun dalam kurun waktu 1 tahun Dokumen penganggaran terdiri dari RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA
					Persentase Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun		Persentase Dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun dalam kurun waktu 1 tahun
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Dokumen perencanaan terdiri dari Renstra PD, Renja PD, Perubahan Renja PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Banyaknya dokumen RKA SKPD yang disusun dalam kurun waktu 1 tahun
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun dalam kurun waktu 1 tahun
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banyaknya dokumen DPA SKPD yang disusun dalam kurun waktu 1 tahun
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Banyaknya dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dalam kurun waktu 1 tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang disusun dalam kurun waktu 1 tahun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja terdiri dari RFK, Laporan Cakin, LKjIP, LKPJ, LPPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyaknya laporan evaluasi kinerja yang disusun dalam kurun waktu 1 tahun Laporan evaluasi kinerja terdiri dari Evaluasi SAKIP, Monev Rencana Aksi, Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOD), Manajemen Risiko
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan perangkat daerah lainnya untuk membahas isu-isu strategis pembangunan daerah sesuai bidang urusan yang dilaksanakan dalam bentuk focus group discussion
				Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banyaknya laporan keuangan yang disusun dalam kurun waktu 1 tahun Laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan bulanan, prognosis, laporan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banyaknya orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dalam kurun waktu 1 tahun
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya Dokumen keuangan yang diuji/diverifikasi dalam kurun waktu 1 tahun Dokumen keuangan yang diverifikasi terdiri dari UP, LS dan GU
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banyaknya laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun dalam kurun waktu 1 tahun
				Meningkatnya administrasi BMD perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Banyaknya Dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola pada tahun berkenaan
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banyaknya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola pada tahun berkenaan
				Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banyaknya laporan dokumen Administrasi kepegawaian dinas dalam waktu 1 tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Banyaknya dokumen sarana prasarana disiplin pegawai non ASN yang dikelola
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Banyaknya paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Banyaknya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ASN yang dikelola
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan peniangkatan kapasitas kelembagaan melalui melalui ISO dan bintek
				Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen laporan pelaksanaan Administrasi Umum PD pada tahun berkenaan
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banyaknya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berkenaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berkenaan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berkenaan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banyaknya paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berkenaan
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banyaknya paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berkenaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banyaknya dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan pada tahun berkenaan
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Banyaknya paket Bahan/Material yang Disediakan pada tahun berkenaan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Banyaknya laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan pada tahun berkenaan
				Terlaksananya Penatausahaan	Jumlah Dokumen	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Banyaknya dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dikelola
				Meningkatnya administrasi pengadaan barang perangkat daerah	Persentase laporan penatausahaan aset dinas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pengadaan BMD merupakan laporan pelaksanaan pengadaan BMD
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan pada tahun berkenaan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan pada tahun berkenaan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Banyaknya mebel yang diadakan pada tahun berkenaan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang adakann pada tahun berkenaan
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Banyaknya Unit Aset Tak Berwujud yang diadakan pada tahun berkenaan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyaknya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun pada tahun berkenaan
				Meningkatnya administrasi	Persentase laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kegiatan jasa penunjang merupakan kebutuhan jasa penunjang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pelayanan umum perangkat daerah	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Pemerintahan Daerah	pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya surat keluar dan surat masuk yang dikelola pada tahun berkenaan
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banyaknya jasa sumber daya yang dibayar setiap bulan pada tahun berkenaan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banyaknya laporan pelayanan umum kantor yang disediakan pada tahun berkenaan
				Meningkatnya administrasi pemeliharaan barang perangkat daerah	Persentase laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah merupakan seluruh barang yang merupakan aset Diskominsta
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara pada tahun berkenaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara pada tahun berkenaan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara pada tahun berkenaan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara pada tahun berkenaan
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Aset tak berwujud yang dipelihara pada tahun berkenaan
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara pada tahun berkenaan

Sumber: Diskominsta (diolah)

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2025-2030

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan													
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	100%	9.473.92 9.750	100%	17.514.9 48.469	100%	13.756.6 14.581	100%	15.331.3 25.609	100%	17.567.3 88.293	
	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	-	14,29%		17,86%		21,43%		25,00%		28,57%		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang terfasilitasi nama sub domain	-	100%	943.100	100%	1.200.000	100%	1.400.000	100%	1.600.000	100%	1.800.000	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	-	1 Dokumen	943.100	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.400.000	1 Dokumen	1.600.000	1 Dokumen	1.800.000	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE	-	28 OPD	9.472.986.650	28 OPD	17.513.748.469	28 OPD	13.755.214.581	28 OPD	15.329.725.609	28 OPD	17.565.588.293	
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	-	2 Dokumen	8.128.200	2 Dokumen	9.500.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.500.000	2 Dokumen	11.000.000	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	28 Perangkat Daerah	1.314.023.660	28 Perangkat Daerah	2.158.202.209	28 Perangkat Daerah	2.300.432.540	28 Perangkat Daerah	2.463.997.421	28 Perangkat Daerah	2.652.097.035	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				2 layana n	105.000. 000	2 layana n	105.000. 000	2 layana n	105.000. 000	2 layana n	105.000. 000	
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	-	1 Lapora n	100.000. 000	2 Lapora n	6.180.00 0.000	2 Lapora n	1.075.00 0.000	2 Lapora n	1.225.00 0.000	2 Lapora n	1.480.00 0.000	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	6 Aplikas i	112.148. 190	7 Aplikas i	86.046.2 60	8 Aplikas i	90.782.0 41	9 Aplikas i	96.228.1 88	10 Aplikas i	102.491. 258	
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	28 OPD	6.551.11 4.800	28 OPD	7.500.00 0.000	28 OPD	8.500.00 0.000	28 OPD	9.500.00 0.000	28 OPD	11.000.0 00.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	-	2 dok	324.042.600	2 dok	265.000.000	2 dok	305.000.000	2 dok	350.000.000	2 dok	400.000.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-	2 dok	1.063.529.200	2 dok	1.210.000.000	2 dok	1.369.000.000	2 dok	1.579.000.000	2 dok	1.815.000.000	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	-	49 %	219.959.830	50 %	252.953.805	51 %	290.896.875	52 %	334.531.406	53	384.711.117	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	219.959.830	100%	252.953.805	100%	290.896.875	100%	334.531.406	100%	384.711.117	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	1 Lapora n	160.466. 500	1 Lapora n	184.536. 475	1 Lapora n	212.216. 946	1 Lapora n	244.049. 488	1 Lapora n	280.656. 911	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	-	28 Perang kat Daerah	59.493.3 30	28 Perang kat Daerah	68.417.3 30	28 Perang kat Daerah	78.679.9 29	28 Perang kat Daerah	90.481.9 18	28 Perang kat Daerah	104.054. 206	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	92 Nilai	1.163.03 0.100	92,5 Nilai	1.337.48 4.615	93 Nilai	1.538.10 7.308	93,5 Nilai	1.768.82 3.404	94 Nilai	2.034.14 6.914	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dikelola	-	100 Persen	1.163.03 0.100	100 Persen	1.337.48 4.615	100 Persen	1.538.10 7.308	100 Persen	1.768.82 3.404	100 Persen	2.034.14 6.914	
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	18 Komun itas	100.749. 100	18 Komun itas	96.521.0 64	18 Komun itas	110.999. 224	18 Komun itas	127.649. 107	18 Komun itas	146.796. 473	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan	-	100 Permoh onan	44.697.3 00	100 Permoh onan	59.169.8 00	100 Permoh onan	68.045.2 70	100 Permoh onan	78.252.0 61	100 Permoh onan	89.989.8 70	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	perundangan												
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	100 Rekomendasi	143.684.400	250 Rekomendasi	49.732.095	250 Rekomendasi	57.191.909	250 Rekomendasi	65.770.696	250 Rekomendasi	75.636.300	
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	-	100 Persen	216.743.360	100 Persen	187.105.000	100 Persen	215.170.750	100 Persen	247.446.363	100 Persen	284.563.317	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	-	3 Media	451.542.940	3 Media	653.496.631	3 Media	751.521.126	3 Media	864.249.294	3 Media	993.886.689	
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	-	84 Konten	205.613.000	84 Konten	267.469.760	84 Konten	307.590.224	84 Konten	353.728.758	84 Konten	406.788.071	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-			47 Orang	23.990.265	47 Orang	27.588.805	47 Orang	31.727.125	47 Orang	36.486.194	
PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	100%		100%		100%		100%		100%		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan data daerah	-	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	-	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-	29 orang	75.000.000	29 orang	75.000.000	29 orang	90.000.000	29 orang	95.000.000	29 orang	95.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP Perangkat Daerah	AA 90,26	AA 90,26	5.706.13 2.478	AA 90,26	12.945.1 06.762	AA 90,26	7.255.11 7.438	AA 90,26	7.927.12 9.182	AA 90,26	8.415.34 2.100	
	Kematangan Organisasi Daerah	40	40		40		40		40		40		
	Pengawasan Kearsipan Internal	A (MEMU ASKAN)	A (MEMU ASKAN)		AA (SANG AT MEMU ASKAN)		AA (SANG AT MEMU ASKAN)		AA (SANG AT MEMU ASKAN)		AA (SANG AT MEMU ASKAN)		
	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3.000	3.001		3.002		3.003		3.004		3.005		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun		100	11.723.8 00	100	23.000.0 00	100	25.300.0 00	100	27.830.0 00	100	30.613.0 00	
	Persentase Dokumen Penganggaran SKPD yang Disusun		100		100		100		100		100		
	Persentase Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun		100		100		100		100		100		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	4.502.35 0	3	5.000.00 0	3	5.500.00 0	3	6.050.00 0	3	6.655.00 0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil		1	1.099.50 0	1	1.500.00 0	1	1.650.00 0	1	1.815.00 0	1	1.996.50 0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		1	1.325.17 5	1	2.000.00 0	1	2.200.00 0	1	2.420.00 0	1	2.662.00 0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		1	1.633.35 0	1	2.500.00 0	1	2.750.00 0	1	3.025.00 0	1	3.327.50 0	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		1	816.675	1	1.500.00 0	1	1.650.00 0	1	1.815.00 0	1	1.996.50 0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	2.346.75 0	5	3.000.00 0	5	3.300.00 0	5	3.630.00 0	5	3.993.00 0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4	2.500.00 0	4	2.750.00 0	4	3.025.00 0	4	3.327.50 0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yangDiampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun		100	5.045.915.238	100	5.550.506.762	100	6.105.557.438	100	6.716.113.182	100	7.387.724.500	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		35	5.029.885.488	35	5.532.874.037	35	6.086.161.440	35	6.694.777.585	35	7.364.255.343	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	13.683.000	12	15.051.300	12	16.556.430	12	18.212.073	12	20.033.280	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	2.346.750	1	2.581.425	1	2.839.568	1	3.123.524	1	3.435.877	
Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada				100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Perangkat Daerah	SKPD												
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14	5.000.000	14	5.500.000	14	6.050.000	14	6.655.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		100	6.472.500	100	18.500.000	100	20.350.000	100	22.385.000	100	24.623.500	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				15	3.000.000	15	3.300.000	15	3.630.000	15	3.993.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35	3.500.000	35	3.850.000	35	4.235.000	35	4.658.500	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12	6.472.500	12	7.000.000	12	7.700.000	12	8.470.000	12	9.317.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10	5.000.000	10	5.500.000	10	6.050.000	10	6.655.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	144.454.300	100	156.600.000	100	172.260.000	100	189.486.000	100	208.434.600	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	8.642.00 0	12	9.000.00 0	12	9.900.00 0	12	10.890.0 00	12	11.979.0 00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6	1.482.40 0	6	2.000.00 0	6	2.200.00 0	6	2.420.00 0	6	2.662.00 0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6	2.500.00 0	6	2.750.00 0	6	3.025.00 0	6	3.327.50 0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	21.275.7 00	12	25.000.0 00	12	27.500.0 00	12	30.250.0 00	12	33.275.0 00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12	6.572.65 0	12	7.000.00 0	12	7.700.00 0	12	8.470.00 0	12	9.317.00 0	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		6	8.100.00 0	6	8.100.00 0	6	8.910.00 0	6	9.801.00 0	6	10.781.1 00	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12	14.358.1 00	12	15.000.0 00	12	16.500.0 00	12	18.150.0 00	12	19.965.0 00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		2	8.000.00 0	2	9.000.00 0	2	9.900.00 0	2	10.890.0 00	2	11.979.0 00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		4	72.468.0 00	4	75.000.0 00	4	82.500.0 00	4	90.750.0 00	4	99.825.0 00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKPD	Konsultasi SKPD												
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12	3.555.450	12	4.000.000	12	4.400.000	12	4.840.000	12	5.324.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penatausahaan aset dinas		100	28.100.000	100	6.680.000.000	100	365.000.000	100	350.000.000	100	83.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1	490.000.000			1	300.000.000			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1	300.000.000			1	28.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1	60.000.000	1	25.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2	28.100.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1	100.000.000							
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1	6.000.000.000							

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lainnya	yang Disediakan												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		100	175.586.490	100	182.500.000	100	200.750.000	100	220.825.000	100	242.907.500	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	2.224.100	1	2.500.000	1	2.750.000	1	3.025.000	1	3.327.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	118.888.000	12	120.000.000	12	132.000.000	12	145.200.000	12	159.720.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		3	54.474.390	3	60.000.000	3	66.000.000	3	72.600.000	3	79.860.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	293.880.150	100	329.000.000	100	360.400.000	100	394.440.000	100	431.384.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15	117.933.400	15	120.000.000	15	132.000.000	15	145.200.000	15	159.720.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Jabatan													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3	35.508.750	3	40.000.000	3	44.000.000	3	48.400.000	3	53.240.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5	3.460.000	5	4.000.000	5	4.400.000	5	4.840.000	5	5.324.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80	99.203.000	80	100.000.000	80	110.000.000	80	121.000.000	80	133.100.000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	37.775.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	

Sumber: Diskominsta (diolah)

Tabel 4.3.
 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
 Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terwujudnya Pengelolaan TIK yang terintegrasi, andal, dan responsif guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien		Mendukung Program Unggulan Walikota: 1. ProDamai 2. Z-Hub 3. Kemura
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			Penyediaan Akses Internet	
			Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Terwujudnya pengamanan		

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	informasi pemerintah daerah		
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik		Mendukung Program Unggulan Walikota: 1. ProDamai 2. Z-Hub 3. Kemura
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Pelayanan Informasi Publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			Diseminasi Informasi	
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Penyusunan Konten	
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		Mendukung Program Unggulan Walikota: 1. Z-Hub
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
			Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
			Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
	KABUPATEN/ KOTA			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Diskominsta (diolah)

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029. Indikator penyelenggaraan urusan Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian tercantum dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.4
 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistikdian
 Kota Magelang Tahun 2025-2029

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun							Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indeks SPBE	Nilai	3,69	3,7	3,72	3,73	3,75	3,76	3,78	
	Tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level	3	3	3	3	3	3	3	
	Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/ pemerintah daerah	Level	4	4	4	4	4	4	4	
	Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/ pemerintah daerah	Level	3	3	3	3	3	3	3	
	Tingkat Kematangan Penerapan manajemen Keamanan SPBE	Level	4	4	4	4	4	4	4	
	Tingkat kematangan Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE	Level	3	3	3	3	3	3	3	
	Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Aplikasi SPBE	Level	3	3	3	3	3	3	3	
	Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Keamanan SPBE	Level	2	2	2	2	2	2	2	
	Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	Level	4	4	4	4	4	4	4	
	Tingkat kematangan layanan data terbuka	Level	5	5	5	5	5	5	5	

Tabel 4.5
 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistikdian
 Kota Magelang Tahun 2025-2029

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	▪ Pembilang Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ▪ Penyebut Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									teknis daerah
	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	▪ Pembilang Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Kab/kota
	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	10,71%	14,29%	17,86%	21,43%	25,00%	28,57%	▪ Pembilang Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD ▪ Penyebut Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah (28 OPD)
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,26	3,26	3,27	3,27	3,28	3,28	5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional. Setiap Domain

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.
	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	49	49	50	51	52	53	▪ Pembilang Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, setelah diverifikasi. ▪ Penyebut Jumlah nilai Optimal Indeks KAMI (918).

BAB V

PENUTUP

Renstra perangkat daerah merupakan panduan kerja bagi perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Magelang. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mendukung visi misi Kepala Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang harus konsisten dan sinergis berdasarkan dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang berkewajiban melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang berkewajiban untuk Menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Magelang 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra, diwajibkan menjabarkan Renstra dalam rencana kerja tahunan;
4. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta memastikan konsistensi pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggung jawab;
6. Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang Tahun 2025-2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku (perubahan kebijakan), serta apabila terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional maupun terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah.

Magelang, 19 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Dan Statistik
Kota Magelang



MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690724 199803 1 006